

**MANAJEMEN PENGEMBANGAN PPI BANYUTOWO
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAD KABUPATEN PATI**

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai



Diajukan oleh :

MOCHAMMAD DJOKO SINGGIH MULJONO

K4A 001 019

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN SUMBERDAYA PANTAI UNIVERSITAS
DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**MANAJEMEN PENGEMBANGAN PPI BANYUTOWO
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAD KABUPATEN PATI**



Oleh :

MOCHAMMAD DJOKO SINGGIH MULJONO

K4A 001 019

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN SUMBERDAYA PANTAI UNIVERSITAS
DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**MANAJEMEN PENGEMBANGAN PPI BANYUTOWO
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PATI**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Magister (S-2)

Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai



Oleh :

MOCHAMMAD DJOKO SINGGIH MULJONO

K4A 001 019

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

KATA PENGANTAR

Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo terletak di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2612 orang, yang bekerja sebagai nelayan adalah 1085 orang. Jarak dari ibukota Kabupaten kurang lebih 42 Km ke arah Utara. Namun demikian Banyutowo bukanlah merupakan profil desa tertinggal, sebab sarana jalan aspal, listrik, angkutan pedesaan, BRI Unit, sarana telekomunikasi dan Kantor Pos telah masuk ke Desa.. Dengan adanya PPI maka aktifitas perekonomian lebih lancar lagi.

Setelah dilakukan penelitian, maka kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana yang ada sekarang ini masih ada beberapa fasilitas pokok, fungsional dan pendukung yang belum terpenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa produksi ikan yang di daratkan di PPI Banyutowo dari tahun 1999–2003 setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata 13,96 % dan Nilai Produksinya meningkat rata-rata sebesar 14,18 %. Dari hasil analisis SWOT, diperoleh hasil bahwa nilai EFAS > IFAS, maka secara kualitatif kegiatan dan kapasitas dari fasilitas sarana prasarana yang ada di PPI Banyutowo masih sangat berpeluang untuk dikembangkan. Dengan dikembangkannya PPI Banyutowo sesuai dengan prioritas yang ada, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat disekitarnya serta PAD Kabupaten Pati akan meningkat.

Semarang, Desember 2005

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ucapan syukur kehadlirat Allah swt, karena atas izin dan ridlo Nya, maka telah penulis selesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai Derajat Sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. Azis Nurbambang, MS dan Ir. Imam Triarso, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan mencurahkan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
2. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS dan Ir. Asriyanto, DFG, MS selaku Dosen Penguji yang telah memberikan sumbang saran dan arahannya untuk penyempurnaan tulisan ini.
3. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS selaku Ketua Program Magister Managemen Sumberdaya Pantai;
4. Gubernur Jawa Tengah atas bantuan pemberian beaya penyelesaian tesis dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah serta Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin belajar;
5. Bapak, Ibu, Istri dan anakku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan dorongan semangat demi terselesaikannya tesis ini;
6. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu sampai dengan selesainya pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap agar tesis ini berguna bagi pembaca.

Semarang, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ILUSTRASI DAN GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi Permasalahan Secara Umum	3
1.3. Masalah Penelitian	5
1.4. Perumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	9
2.1.1. Fasilitas Pokok	12
2.1.2. Fasilitas Fungsional	13
2.1.3. Fasilitas Penunjang	14
2.2. Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	15
2.3. Sistem Pelelangan Ikan	21
2.4. Strategi Pengembangan	24
2.5. Otonomi Daerah	25
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1. Metode Penelitian	27
3.2. Metode Pengumpulan Data	27
3.3. Metode Analisa Data	28
3.3.1. Analisa Indeks Relatif Nilai Produksi	28
3.3.2. Analisis: Produksi, Nilai Produksi, Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM	29
3.3.3. Analisis Proyeksi	29
3.3.4. Analisis SWOT	31
3.3.5. Waktu dan Tempat	34
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum	35
4.1.1. Letak dan Luas Wilayah Desa Banyutowo	35
4.1.2. Kependudukan	35
4.1.3. Administrasi Pemerintahan	38
4.1.4. Pendidikan	38

4.1.5. Transportasi dan Komunikasi	40
4.1.6. Agama	41
4.1.7. Perekonomian	41
4.2. Analisis PPI Banyutowo	42
4.2.1. Analisis Kelengkapan Fasilitas Sarana dan Prasarana PPI Banyutowo	42
4.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana	44
4.2.3. Fungsi Sarana dan Prasarana	46
4.2.4. Analisis Produksi Ikan di PPI Banyutowo	48
4.2.5. Analisis Estimasi Produksi Ikan di PPI Banyutowo ..	50
4.2.6. Analisis Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95%	52
4.2.7. Analisis Estimasi Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95%	52
4.2.7.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati dari Sub Sektor Perikanan	53
4.2.8. Analisis Indeks Relatif	54
4.2.9. Analisis Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo tahun 1999 – 2003	55
4.2.10. Analisis Estimasi Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo	56
4.2.11. Analisis Kebutuhan BBM	57
4.2.12. Analisis Estimasi Kebutuhan BBM	58
4.3. Hasil Analisis PPI Banyutowo	59
4.3.1. Faktor Internal	60
4.3.1.1. Kekuatan dari Faktor Internal	60
4.3.1.2. Kelemahan dari Faktor Internal	61
4.3.2. Faktor Eksternal	62
4.3.2.1. Peluang dari Faktor Eksternal	62
4.3.2.2. Ancaman dari Faktor Eksternal	63
4.3.3. Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal	64
4.3.4. Pembobotan	65
4.3.5. Pemberian Rating	66
4.3.6. Penentuan Attractive Score	66
4.4. Analisis SWOT PPI Banyutowo	68
4.5. Matriks QSP	72
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Nomor.	Judul	Halaman
1.	Komposisi Jumlah Penduduk menurut Umur	36
2.	Komposisi Jumlah Penduduk menurut Mata Pencarian.....	37
3.	Jumlah Sarana Pendidikan dan Tenaga Pengajar	39
4.	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan	39
5.	Kondisi Sarana dan Prasarana PPI Banyutowo	44
6.	Fungsi Sarana dan Prasarana PPI Banyutowo menurut Persepsi Masyarakat	46
7.	Produksi Ikan di PPI Banyutowo tahun 1999 – 2003	48
8.	Estimasi Produksi Ikan di PPI Banyutowo	50
9.	Analisis Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95%	52
10.	Analisis Estimasi Nilai Produksi dan Hasil Retribusi Lelang 0,95% ..	52
11.	Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Perikanan	53
12.	Analisis Indeks Relatif Nilai Produksi Ikan di PPI Banyutowo Tahun 1999 – 2003	54
13.	Analisis Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo tahun 1999 – 2003	55
14.	Analisis Estimasi Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo	56
15.	Analisis Kebutuhan BBM di PPI Banyutowo tahun 1999 – 2003 ...	58
16.	Analisis Estimasi Kebutuhan BBM	59
17.	Analisis Faktor Internal (Kekuatan)	60
18.	Analisis Faktor Internal (Kelemahan)	61
19.	Analisis Faktor Eksternal (Peluang)	62
20.	Analisis Faktor Eksternal (Ancaman)	63
21.	Analisis Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal	65
22.	Hasil Penghitungan Internal Factor Analysis Strategic (IFAS)	69
23.	Hasil Penghitungan External Factor Analysis Strategic (EFAS)	69
24.	Matriks Analisis SWOT	71
25.	Tabulasi Pembobotan Strategi dari Matriks QSP	72

DAFTAR ILLUSTRASI DAN GAMBAR

	Halaman
1. Skema Alur Penelitian	7
2. Lay Out PPI Banyutowo	133
3. Peta Lokasi Penelitian di PPI Banyutowo	134
4. Dokumentasi Lahan Reklamasi	135
5. Dokumentasi Kompleks TPI dan Kantor PPI	136
6. Dokumentasi Lantai Lelang dan Drainase PPI	137
7. Dokumentasi Ruang Pertemuan Nelayan dan Kantor KUD	138
8. Dokumentasi Waserda dan Situasi Lelang di TPI	139
9. Dokumentasi Jalan Aspal dan Alur Pelabuhan	140
10. Dokumentasi Dermaga dan Pier Penahan Gelombang	141
11. Dokumentasi Turap Tanah Reklamasi dan Tambatan Kapal.....	142

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor.	Judul	Halaman
1.	Analisis Kelengkapan Sarana & Prasarana PPI Banyutowo	79
2.	Analisis Produksi Ikan dari Tahun 1999 – 2003	82
3.	Analisis Estimasi Produksi Ikan	84
4.	Analisis Nilai Produksi Ikan Tahun 1999 – 2003	86
5.	Analisis Estimasi Nilai Produksi Ikan	88
6.	Analisis Nilai Indeks Relatif Produksi Ikan di PPI Banyutowo Tahun 1999 – 2003	90
7.	Analisis Kunjungan Kapal Tahun 1999 – 2003	92
8.	Analisis Estimasi Kunjungan Kapal	94
9.	Analisis Kebutuhan BBM.....	96
10.	Analisis Estimasi Kebutuhan BBM	98
11.	Model Estimasi Produksi..... 100	
12.	Model Estimasi Nilai Produksi	101
13.	Model Estimasi Jumlah Kunjungan Kapal	102
14.	Model Estimasi Kebutuhan BBM	103
15.	Kuisisioner Analisis SWOT (untuk menentukan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)	104
16.	Hasil Penilaian Respoden terhadap Faktor Internal dan Eksternal ...	109
17.	Daftar Isian untuk Menentukan Bobot dari Matriks IFE dan EFE ..	110
18.	Hasil Penghitungan Bobot untuk Faktor Internal dan Eksternal	112
19.	Daftar Isian untuk Menentukan Rating dari Matriks IFE dan EFE...	113
20.	Hasil Penghitungan Rating untuk Faktor Internal dan Eksternal	115
21.	Daftar Isian Attractive Score Matriks QSP	116
22.	Hasil Kuisisioner Attractive Score Matriks QSP	125
23.	Daftar Responden	132a

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semula nelayan mendaratkan kapal dan hasil tangkapannya berupa ikan di sepanjang pantai yang terlindung dari hantaman gelombang, di teluk-teluk yang sempit dan terlindung, di selat-selat yang sempit dan tenang, dan di muara-muara sungai dekat pemukiman mereka. Kondisi ini tidak bertahan lama karena kapal yang mereka miliki cepat rusak, tidak aman dan mereka merasakan bahwa tidak ada persatuan diantara mereka. Sehingga mereka membutuhkan tempat khusus untuk pendaratan bagi kapalnya yang disebut Pelabuhan Perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan terdiri dari bangunan darat dan bangunan laut yang memerlukan biaya pembangunan cukup mahal.

Berdasarkan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 41, Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa Menteri menetapkan: a) rencana induk pelabuhan perikanan secara Nasional, b) klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan, c) persyaratan dan atau standart teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan, d) wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan dan e) pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.

Kabupaten Pati terletak pada posisi $6^{\circ}25'$ - 7° LS dan 110° - 111° BT berhadapan langsung dengan perairan Laut Jawa dengan luas wilayah $1.491,13 \text{ km}^2$

dan memiliki garis pantai sepanjang 60 km (Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jawa Tengah, 1991 : 49), memiliki 7 (tujuh) PPI yaitu : Bajomulyo, Pecangaan, Margomulyo, Alasdowo, Sambiroto, Banyutowo dan Puncel. Dari ketujuh PPI tersebut, PPI Banyutowo merupakan PPI ketiga terbesar di Kabupaten Pati.

Selama kurun waktu operasionalnya sampai sekarang, PPI Banyutowo telah berfungsi dengan baik. Segenap fasilitas yang ada telah difungsikan dan telah dimanfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas: kapal melaut, pemasaran ikan, penanganan, pengolahan dan pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian dan pengawasan kapal ikan, penyampaian informasi perikanan kepada nelayan, pengembangan masyarakat nelayan dan pembinaan masyarakat di sekitar pantai.

Walaupun pelabuhan ini telah berfungsi dengan baik, namun masih ada kendala dan hambatan yang ditemui di dalam operasionalnya. Masalah pokoknya adalah layanan yang diberikan belum optimal karena kondisi fasilitas yang ada sudah tidak mampu lagi menampung jumlah dan aktivitas kapal perikanan yang ada. Sehingga untuk melayani kapal yang ada dan kapal yang akan berpangkalan di pelabuhan Banyutowo perlu diupayakan pengembangannya. Dengan adanya pengembangan pelabuhan ini diharapkan semua aktivitas perikanan di Banyutowo akan meningkat, sehingga harapan pengembangan tersebut perlu segera diwujudkan.

1.2. Kondisi Permasalahan Secara Umum

Fungsi pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Banyutowo adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan

hasil tangkapannya serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan. Berdasarkan fungsi itu, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pelabuhan ini adalah dengan pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas kapal dan pendapatan nelayan akan meningkat.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi PPI Banyutowo dalam operasionalnya adalah:

a. Kondisi kapasitas fasilitas yang ada

Kondisi lantai lelang khususnya di tempat pelelangan induk sudah rusak dan lantai tempat pengolahan juga rusak. Hal lain, yaitu belum adanya pintu pada pagar masuk ke TPI sebagai pengaman serta saluran drainase yang kondisinya rusak parah sehingga sudah tidak berfungsi lagi.

Terbatasnya fasilitas sarana prasarana yang ada saat ini masih belum menarik minat investor untuk membuka industri perikanan di PPI.

b. Sistem pengelolaan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pelelangan Ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah banyak aturan kepelabuhanan perikanan yang belum disiapkan. Peraturan Pemerintah tentang Pelabuhan Perikanan sebagai penjabaran dari UU No 31 Tahun 2004 belum ada.

Sehingga di dalam pembangunan dan operasionalnya mengacu kepada aturan dari Menteri Perhubungan seperti SK Menhub No KM 35/AL.106/PHB-85, UU No 21/1992 tentang pelayaran, PP 70/1996 tentang kepelabuhanan. Selain itu masih ada SK Menteri Pertanian untuk operasional pelabuhan perikanan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan seperti SK Menteri Pertanian No 613/1983 tentang tarif. Penerimaan retribusi dari PPI Banyutowo kepada

Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1984 sebesar 1 % dari nilai raman mencakup penerimaan tahun 1996 dan tahun 1997.

Penerimaan retribusi TPI untuk Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 1998 dan 1999 berlaku Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999, dimana Pemerintah Kabupaten hanya menerima 0,40 %. Perkembangan selanjutnya diterbitkan perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2000, dimana dengan Perda yang baru ini Pemerintah Kabupaten / Kota menerima kontribusi dari retribusi sebesar 0,95 % dari nilai raman.

Rendahnya realisasi penerimaan retribusi TPI pada tahun 1999 diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan fiskal yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diikuti oleh Inmendagri Nomor 8, 9, dan 10 sehingga pungutan retribusi daerah menjadi berubah dan pada tahun tersebut merupakan masa transisi yang cukup sulit.

c. Kondisi nelayan

Nelayan belum optimal dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo karena sikap nelayan yang belum mematuhi tata tertib sebagaimana mestinya. Selain itu juga akibat pemahaman Otonomi Daerah yang salah, maka terjadi sengketa antara nelayan lokal dengan nelayan luar daerah khususnya dari Jawa Timur, terutama masalah pelanggaran jalur penangkapan dan alat tangkap ikan.

Hal ini mengakibatkan produksi ikan dari PPI Banyutowo mengalami penurunan, sehingga banyak bakul ikan yang tidak mendapatkan dagangan, akhirnya pindah

ke tempat lain. Selain itu kesepakatan nelayan Banyutowo yang akan melelangkan ikan sesuai dengan hasil tangkapannya tidak terlaksana dengan baik, karena ada sebagian nelayan masih menjual ikan hasil tangkapannya di luar TPI.

1.3. Masalah Penelitian

Dari kendala dan hambatan yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo seperti tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah meningkatkan peran dan fungsi PPI Banyutowo sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat sekitarnya.
- b. Bagaimanakah upaya mengembangkan sarana dan prasarana di PPI Banyutowo sehingga dapat memenuhi kebutuhan nelayan maupun pedagang yang terkait dengan aktifitas perikanan yang dilakukan.

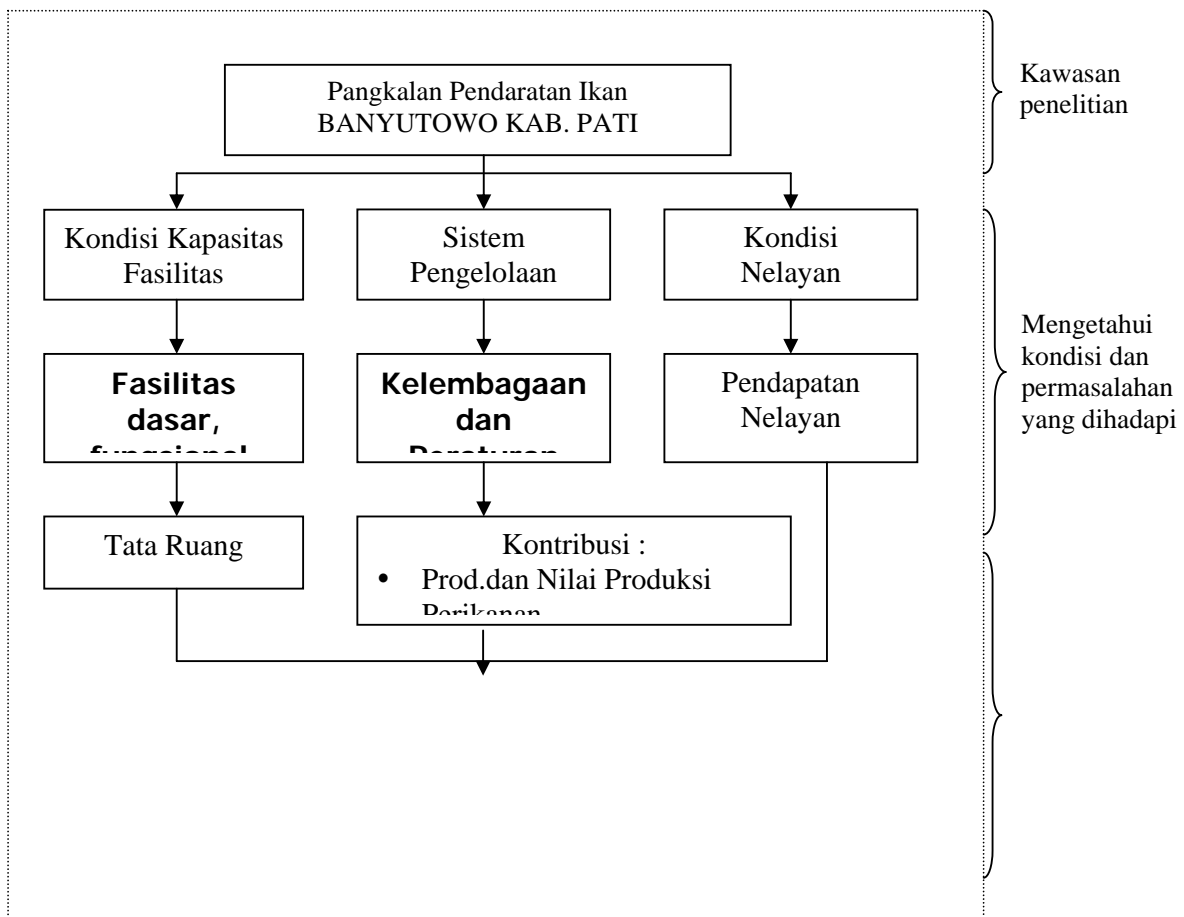
1.4. Perumusan Masalah

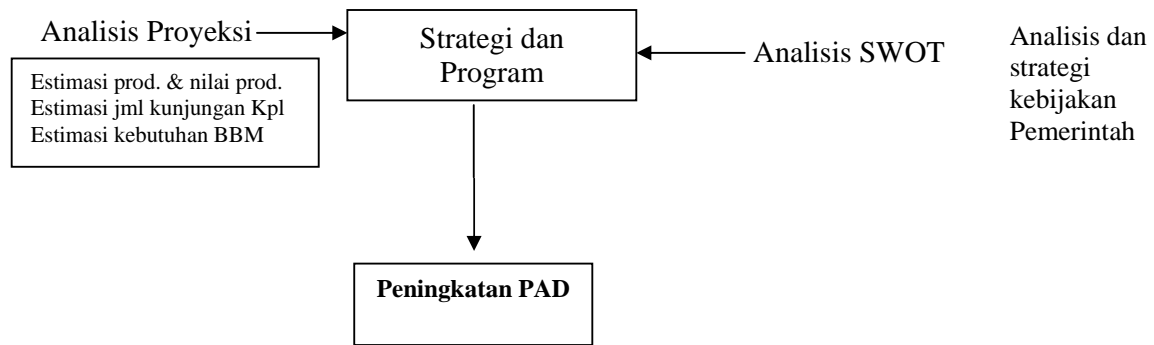
1. Untuk meningkatkan peran dan fungsi PPI Banyutowo perlu di analisis dan dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Analisis Indeks Relatif Nilai Produksi dari tahun 1999 – 2003.
 - b. Analisis dari: Produksi, Nilai Produksi, Jumlah Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM bagi Kapal Perikanan dari tahun 1999–2003.
 - c. Analisis Estimasi dari: Produksi, Nilai Produksi, Jumlah Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM bagi kapal perikanan untuk tahun 2004, 2005, 2010, 2015 dan 2020.
 - d. Analisis SWOT

2. Untuk mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana di PPI sesuai

dengan kebutuhan maka dirumuskan sebagai berikut:

- a. Analisis Estimasi dari: Produksi, Nilai Produksi, Jumlah Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM bagi kapal perikanan untuk tahun 2004, 2005, 2010, 2015 dan 2020.
- b. Analisis SWOT
- c. Matriks QSP





Ilustrasi 1. Skema Alur Penelitian

Keterangan :



Lingkup Penelitian

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji lebih jelas kondisi fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo dan menyusun strategi pengembangan serta peningkatan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai tempat penyelenggaraan pelelangan ikan.
2. Menganalisis besarnya kontribusi Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk perencanaan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo.

2. Mengetahui atribut-atribut model dalam perencanaan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo, Kabupaten Pati

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor : 604/ Kpts/OT.210/9/95 tertanggal 7 September 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelas yakni :

Pelabuhan Perikanan Samudera.

Pelabuhan ini direncanakan terutama untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah ZEE Indonesia dan perairan internasional. Lokasi pelabuhan dimaksud di DKI Jakarta dan Kendari (Sulawesi Tenggara).

Pelabuhan Perikanan Nusantara.

Pelabuhan ini direncanakan terutama untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah dan ZEE Indonesia. Lokasi pelabuhan dimaksud di Belawan dan Sibolga (Sumatera Utara), Bungus (Sumatera Barat), Pelabuhan Ratu (Jabar), Pekalongan dan Cilacap (Jateng) serta Brondong (Jatim).

Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pelabuhan ini direncanakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai. Lokasi pelabuhan dimaksud di Lampulo (Aceh), P. Telo (Sumatera Utara), Sikakap (Sumatera Barat), Tarempa (Riau), Tanjung Pandang (Sumatera Selatan), Karanghantu (Jawa Barat), Karimun Jawa (Jawa Tengah), Bawean dan Prigi (Jawa Timur), Labuhan Lombok (NTB), Kupang (NTT), Teluk Batang (Kal. Barat), Hantipan (Kalimantan Tengah), Tarakan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Dagho (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku) serta Sorong (Irian Jaya).

Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan tempat bertambat dan labuh perahu / kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkungan kerja ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka

memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan perahu / kapal dan usaha perikanan. Lebih lanjut PPI merupakan salah satu unsur prasarana ekonomi yang dibangun dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama untuk perikanan skala kecil. Pangkalan pendaratan ikan ini untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai dan lokasinya tersebar di seluruh Indonesia..

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan menjadi 4 tersebut didasarkan atas ketersediaan fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna yang ada di pelabuhan perikanan yang bersangkutan. Semakin besar kemampuan fasilitas untuk menampung dan memberikan pelayanan kepada para pengguna akan semakin tinggi kelasnya.

Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan sangat strategis, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar aset pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat nelayan dan pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah setempat, (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996 / 1997).

Sesuai dengan fungsinya, ruang lingkup kegiatan PPI dibedakan menjadi 3 (tiga) hal pokok, yakni :

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi meliputi : tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat tangkap perikanan.

- b. Kegiatan yang berkaitan dengan pengawetan, pengolahan dan pemasaran meliputi : penanganan ikan hasil tangkap (pengolahan dan pengawetan), pengepakan dan penyaluran.
- c. Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan meliputi penyuluhan dan pelatihan, pengaturan (keamanan, pengawasan dan perijinan), pengumpulan data statistik perikanan serta pembinaan perkoperasian dan ketrampilan nelayan.

Ditinjau dari fungsinya, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan prasarana penangkapan yang diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan berskala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perikanan, pengembangan wilayah, agrobisnis dan agroindustri serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas pendukung, (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996/ 1997).

2.1.1. Fasilitas Pokok

Merupakan fasilitas yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, tempat membongkar ikan hasil tangkapan dan memuat perbekalan, serta tempat tambat labuh kapal-kapal penangkap ikan. Fasilitas dasar ini meliputi :

- a. Penahan Gelombang (Piers)

Berfungsi untuk menahan datangnya gelombang agar kapal atau perahu yang berlabuh pada pelabuhan tersebut terlindung dari pengaruh gelombang.

- b. Alur Pelayaran

Berfungsi untuk memperlancar keluar / masuknya kapal atau perahu di pelabuhan tersebut.

c. Kolam Pelabuhan

Berfungsi untuk melindungi kapal atau perahu yang berlabuh pada pelabuhan tersebut terlindung dari pengaruh angin / gelombang.

d. Dermaga

Berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal atau perahu dalam membongkar muatan atau mengisi bahan perbekalan.

2.1.2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional ini terdiri dari :

a. Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

adalah fasilitas yang merupakan sentra kegiatan di lingkungan kerja pelabuhan perikanan, yaitu merupakan tempat bertemunya nelayan sebagai produsen dan pedagang sebagai konsumen.

b. Sarana Logistik

Meliputi pabrik es, persediaan air tawar, bahan bakar serta perbekalan untuk melaut.

c. Sarana Handling atau Processing Ikan

Meliputi tempat penyortiran, pengepakan, penjemuran, pengasinan, pemindangan, dan lain-lain.

d. Sarana untuk Perbaikan / Perawatan

Meliputi galangan kapal. Docking yard tempat penjemuran dan perbaikan alat tangkap serta perbengkelan.

e. Sarana untuk Crew Kapal

Meliputi tempat mandi umum, balai pengobatan, gedung / balai pertemuan nelayan dan tempat untuk beristirahat nelayan (crew kapal)

f. Sarana Komunikasi dan Navigasi

Meliputi telepon, handphone, fax, telegram, radio / SSB, Buoy.

2.1.3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung mempertinggi peranan pelabuhan perikanan dan tidak termasuk fasilitas dasar atau fungsional, yaitu meliputi .

a. Kantor administrasi (Adpel, Syahbandar, Bea Cukai, Keamanan, dan lain-lain).

b. Toko / warung serba ada (Waserda).

c. Balai pertemuan nelayan.

d. Perumahan karyawan / mess operator

e. MCK umum

f. Sarana ibadah

g. Sarana kesehatan

- h. Perumahan / pemukiman nelayan
- i. Tempat penginapan nelayan
- j. Saluran drainase dan fasilitas kebersihan lainnya.
- k. Fasilitas pembersih limbah kapal dan industri perikanan

Tersedianya fasilitas yang lengkap bagi suatu PPI diharapkan akan mampu memenuhi dan melayani masyarakat penggunanya. Volume dan kapasitas menampung jumlah kapal yang mendarat beserta muatannya tergantung dari tingkat pelayanan dan ukuran fasilitas yang tersedia.

2.2. Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pembangunan dan penyediaan fasilitas prasarana perikanan dan dalam hal ini Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perikanan dalam menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut adalah sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 41 yang isinya sebagai berikut :

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.
 - (2) Menteri menetapkan:
 - a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - c. persyaratan dan atau standart teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan, dan
 - e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus men- daratkan ikan tangkapannya di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin

Sedangkan menurut Penjelasan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 41 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- ❖ Ayat (1) :
 - Dalam rangka pengembangan perikanan, Pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi, antara lain sebagai tempat tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

- ❖ Ayat (2) :
 - Huruf d
Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis.
Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinat dengan instansi yang bersangkutan.
 - Huruf e
Pihak swasta dapat membangun pelabuhan perikanan atas persetujuan Menteri.

- ❖ Ayat (4)
 - Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.

Menurut Direktorat Jendral Perikanan (1995), bahwa fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut :

a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan;

Sebagai pusat pengembangan dan sentra kegiatan masyarakat nelayan, Pelabuhan Perikanan diarahkan dapat mengakomodir kegiatan nelayan baik nelayan setempat maupun nelayan pendatang.

b. Tempat berlabuh kapal perikanan;

Pelabuhan Perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (*landing*) dan tambat/merapat (*mouring*) kapal-kapal perikanan, berlabuh/ merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan (*unloading*), memuat perbekalan (*loading*), istirahat (*berthing*), perbaikan apung (*floating repair*) dan naik dock (*docking*). Sehingga sarana atau fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat, dock/slipway menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut.

c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan;

Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (*unloading activities*) Pelabuhan Perikanan selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai dermaga (*apron*) yang cukup memadai, untuk menjamin penanganan ikan (*fish handling*) yang baik dan bersih didukung pula oleh sarana / fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan (*basket*).

d. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan;

Pelabuhan Perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar serta untuk kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, pemasaran / pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap.

- e. Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan;

Prinsip penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, cepat dan dingin (*clean, quick and cold*). Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap Pelabuhan Perikanan harus melengkapi fasilitas-fasilitasnya seperti fasilitas penyimpanan (*cold storage*) dan sarana / fasilitas sanitasi dan higien, yang berada di kawasan Industri dalam lingkungan kerja Pelabuhan Perikanan.

- f. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan;

Dalam menjalankan fungsi, Pangkalan Pendaratan Ikan dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan (*Fish Market*) untuk menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.

- g. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;

Pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat penangkapan sampai kedatangan konsumen. Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap selayaknya dilengkapi unit pengawasan mutu hasil perikanan seperti laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) dan perangkat pendukungnya, agar nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkontrol mutu produk yang dihasilkan.

- h. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data;

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan bimbingan dan penyuluhan, baik secara teknis maupun manajemen usaha yang efektif dan efisien. Sebaliknya untuk membuat langkah kebijaksanaan dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, selain data primer yang didapat melalui penelitian, maka data sekunder juga diperlukan. Untuk itu, maka didalam kawasan Pelabuhan Perikanan juga bisa digunakan untuk penyuluhan dan pengumpulan data.

- i. Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan;

Pelabuhan Perikanan sebagai basis pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal ikan dan hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan pengawasan di laut, Pelabuhan Perikanan dapat dilengkapi dengan pos/pangkalan bagi para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan di laut.

Menurut Damaredjo (1991), untuk mendukung peranan pelabuhan perikanan tersebut dalam operasionalnya diperlukan fasilitas-fasilitas yang dapat :

- a. Memperlancar kegiatan produksi dan pemasaran hasil tangkapan.
- b. Menimbulkan rasa aman bagi nelayan terhadap gangguan alam dan manusia.
- c. Mempermudah dalam pembinaan serta menunjang pengorganisasian usaha nelayan dalam unit ekonomi.

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka pelabuhan perikanan harus dapat dikembangkan fungsinya dari *service centre* menjadi *marketing centre*. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran (*market channel*) yang teguh dan menciptakan *growth centre* di PPI Banyutowo dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat khususnya nelayan.

2.3. Sistem Pelelangan Ikan

Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan antara penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang mereka sepakati bersama

Secara tradisional setelah nelayan memperoleh hasil ikan tangkapan, mereka lalu mencoba menjual sendiri kepada konsumen setempat melalui cara barter atau dengan nilai uang tertentu. Kegiatan ini tidak terorganisir dengan baik dan kurang efisien dan tidak produktif, mutu ikan tidak dijaga sehingga harga ikan cenderung menurun. Perkembangan lain yaitu adanya upaya bahwa pemasaran ikan harus dirubah yakni dari sistem penjualan ikan yang sendiri - sendiri menjadi sistem penjualan ikan secara lelang dan terorganisir.

Hal ini akan sangat menguntungkan karena harga tidak ditentukan oleh pembeli dan mutu ikan dapat dipertahankan serta nilai jual yang diperoleh nelayan menjadi lebih besar. Melihat kenyataan demikian, pelaksanaan lelang akhirnya menjadi kebutuhan nelayan.

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka bahwa menurut UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada pasal 41 disebutkan bahwa Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Tujuan pengaturan tata niaga oleh Pemerintah agar proses tata niaga ikan berjalan tertib sehingga nelayan sebagai produsen dan pembeli akan memperoleh manfaat dan saling menguntungkan. Salah satu bentuk pengaturan yang telah diatur oleh Pemerintah adalah mewajibkan semua ikan hasil tangkapan agar dilakukan proses pelelangan ikan kecuali ikan-ikan untuk ekspor, ikan-ikan dalam jumlah kecil untuk konsumsi nelayan, ikan-ikan hasil tangkapan untuk penelitian. Dengan demikian proses pelelangan ikan ini ditujukan untuk pengaturan tata niaga ikan di dalam negeri. Sistem pelelangan ini ditujukan untuk hasil tangkapan ikan yang dijual bukan untuk tujuan ekspor.

Untuk memperlancar proses pelelangan ikan ini, Pemerintah telah membangun tempat pelelangan ikan yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan.

Tempat pelelangan ikan di suatu Pelabuhan Perikanan adalah merupakan sentral kegiatan perikanan. Dengan demikian semakin berfungsinya tempat pelelangan ikan untuk aktivitas pelelangan ikan maka semakin berfungsi pula suatu Pelabuhan Perikanan. Namun demikian tidak semua Pelabuhan Perikanan diharuskan memiliki tempat pelelangan ikan, tergantung dimana pelabuhan perikanan itu berada dan fungsi utamanya untuk apa, sebagai contoh pelabuhan perikanan yang berada di

Indonesia Bagian Timur dan lokasi pelabuhan perikanan yang berada pada daerah terpencil yang jumlah penduduknya relatif sedikit dan umumnya melayani aktivitas bongkar muat ikan untuk tujuan ekspor tidak memerlukan tempat pelelangan ikan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelelangan ikan bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual yang akan diperoleh nelayan yang pada akhirnya akan merubah taraf hidupnya kearah lebih sejahtera. Walaupun Pemerintah telah mengatur aktivitas pelelangan ikan ini, namun yang berjalan hanya ada di Pulau Jawa saja khususnya di Jawa Tengah, sedangkan tempat-tempat lain aktivitas lelang ikan ini belum berjalan.

Dari aspek ekonomi, dengan proses pelelangan ikan maka nelayan dapat diuntungkan dengan adanya harga jual ikan standar. Selain itu pembeli memperoleh keuntungan karena harga beli ikan yang cukup wajar. Sedangkan Pemerintah Daerah mendapat keuntungan berupa Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian masyarakat secara tidak langsung juga akan merasakan denyut nadi perekonomian yang meningkat akibat adanya aktivitas kegiatan pelelangan ikan.

Dari aspek sosial-budaya terlihat bahwa masyarakat nelayan berkomunikasi satu sama lain dan mereka memperoleh informasi di TPI sehingga pada akhirnya akan merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif.

Di dalam transaksi penjualan ikan antara nelayan dengan pedagang ikan pada umumnya posisi nelayan lemah dan harga ikan biasanya ditentukan oleh pedagang ikan sehingga harga ikan menjadi lebih rendah atau murah. Situasi tersebut menunjukkan

terjadinya kegagalan pasar dikarenakan transaksi penjualan ikan hanya menguntungkan pedagang ikan dan merugikan nelayan. Sehubungan dengan situasi kegagalan pasar didalam transaksi penjualan ikan tersebut di atas menurut Rachbini DJ (1996) terbuka kemungkinan masuknya peranan Negara cq Pemerintah untuk mendorong terwujudnya mekanisme pasar yang efektif sehingga kesejahteraan optimal pelaku-pelaku ekonomi didalamnya bisa tercapai secara lebih baik..

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Direktur Bina Prasarana Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari pada laju peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan perikanan sebagai sentra produksi semakin nyata.
2. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari laju frekwensi kunjungan kapal berarti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan lebih efisien.

3. Laju peningkatan volume penyaluran es lebih tinggi dari pada volume pendaratan yang berarti meningkatnya kesadaran akan mutu ikan segar yang harus dipertahankan

2.4. Strategi Pengembangan

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan perikanan adalah analisis keragaman yang dikenal dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini umumnya digunakan karena memiliki kelebihan yang sederhana, fleksibel, menyeluruh, menyatukan dan berkolaborasi. Dengan analisis ini akan dapat diketahui keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal, sehingga dapat menghasilkan kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, F. 2000).

SWOT merupakan alat untuk menyusun suatu strategi dalam mengembangkan suatu usaha. SWOT merupakan singkatan dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat*. Kekuatan (*strength*) adalah unsur dari potensi sumberdaya yang dapat melindungi dari persaingan dan dapat menciptakan suatu kemajuan dalam suatu kegiatan atau usaha. Kelemahan (*weakness*) adalah unsur dari potensi sumberdaya yang tidak dapat menciptakan suatu kemajuan dalam kegiatan atau usaha.

Peluang (*opportunity*) adalah unsur lingkungan yang dapat memungkinkan suatu kegiatan atau usaha untuk mendapatkan keberhasilan yang tinggi. Ancaman (*threat*) adalah unsur lingkungan yang dapat mengganggu atau menghalangi suatu kegiatan atau usaha jika tidak ada tindakan tegas yang segera diambil (Kotler dan Bloom, 1987).

Dengan memilih alternatif strategi yang terbaik untuk diterapkan, maka setiap alternatif yang ada diberi nilai sesuai dengan tingkat kepentingannya, kemudian diberi ranking dan ini dilakukan secara obyektif. Nilai-nilai yang diberikan pada masing-masing unsur dilakukan dengan melihat hubungan serta pengaruhnya bagi kepentingan pembangunan PPI/TPI Banyuwoto. Hal-hal yang paling mendasar dan sangat berpengaruh bagi kepentingan pengembangan, akan memperoleh nilai yang lebih besar.

2.5. Otonomi Daerah

Pemerintah Indonesia menjelaskan pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pasal I (h), yang menyatakan "Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bahwa prakarsa untuk membuat perencanaan, pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan harus banyak datang dari

daerah yang bersangkutan. Para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

Penerapan desentralisasi dalam wujud Otonomi Daerah menimbulkan suatu permasalahan dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perimbangan keuangan yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama dalam penyelenggaraan pemerintah (Sidik, 2000).

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah harus pandai-pandai mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki guna menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerahnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diperoleh dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang menggambarkan fase spesifik atau keseluruhan personalitas (Maxfield *dalam* Nazir, 1988). Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey di lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Menurut (Marzuki, 2000), data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) di lokasi penelitian (dalam hal ini lokasi penelitian yang dimaksud adalah Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati) dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 100 (seratus) responden terpilih, yaitu terdiri dari: Karyawan Tempat Pelelangan Ikan Banyutowo sebanyak = 16 orang, nelayan = 60 orang, bakul ikan = 13 orang, tokoh masyarakat = 5 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati = 4 orang, Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati = 2 orang. Disamping wawancara juga dengan pengisian daftar pertanyaan (kuisisioner) untuk melakukan pengamatan dan pencatatan serta menyampaikan pendapat sebagaimana tercantum dalam kuisisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga yang berkaitan dengan bidang perikanan, antara lain: monografi desa Banyutowo, Kantor TPI Banyutowo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan (BPPI) Wilayah Pati, Kantor Statistik Kabupaten Pati, Bappeda Kabupaten Pati, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah disertai dengan studi literatur.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengolah data primer dan menggunakan:

- a. Analisis Indeks Relatif Nilai Produksi;
- b. Analisis dari: Produksi, Nilai Produksi, Jumlah Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM;
- c. Analisis Proyeksi dari: Produksi, Nilai Produksi, Jumlah Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM, Analisa SWOT serta alternatif strategi dari Matriks QSP.

3.3.1. Analisis Indeks Relatif Nilai Produksi

Untuk melihat kontribusi Nilai I digunakan rumus sebagai berikut :

$$I = (N_p / N_t) / (Q_p / Q_t)$$

Keterangan :

I = Indeks Relatif Nilai Produksi

N_p = Produksi perikanan di PPI Banyutowo (Kg)

N_t = Produksi perikanan di Kabupaten Pati (Kg)

Q_p = Nilai produksi perikanan di PPI Banyutowo (Rp)

Q_t = Nilai produksi perikanan di Kabupaten Pati (Rp)

Data produksi dan nilai produksi perikanan yang dianalisis adalah selama 5 tahun (1999 – 2003) dari masing-masing kegiatan untuk periode yang sama. Indeks ini akan menjelaskan perbandingan produksi perikanan relatif dari Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Pati yang mana apabila :

$I = 1$; Artinya bahwa kualitas pemasaran ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo sama baiknya dengan kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Pati..

$I > 1$; Artinya adalah kualitas pemasaran ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo lebih baik daripada kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Pati.

$I < 1$; Artinya kualitas pemasaran ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo kurang baik dibandingkan dengan kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Pati.

3.3.2. Analisis dari: Produksi, Nilai Produksi, Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM

Data Produksi, Nilai Produksi, Kunjungan Kapal dan Kebutuhan BBM dianalisis selama 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

3.3.3. Analisis Proyeksi

Sering terdapat waktu tenggang (*lead time*) antara kesadaran akan peristiwa atau kebutuhan mendatang dengan peristiwa itu sendiri.

Adanya waktu tenggang (*lead time*) ini merupakan alasan utama bagi perencanaan dan peramalan. Jika waktu tenggang ini panjang dan hasil peristiwa akhir bergantung pada faktor-faktor yang dapat diketahui, maka perencanaan dapat memegang peranan penting. Dalam situasi seperti itu peramalan diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan terjadi atau timbul, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan.

Model deret berkala (*time series*) seringkali dapat digunakan dengan mudah untuk meramal. Bilamana data yang diperlukan tersedia, suatu hubungan peramalan dapat dihipotesiskan baik sebagai fungsi dari waktu atau sebagai fungsi dari variabel bebas, kemudian diuji. Langkah penting dalam memilih suatu metode deret berkala (*time series*) yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji (Makridakis, *et al*, 1999).

Adapun data yang dianalisis tersebut adalah:

- a. Analisis Estimasi Produksi dihitung untuk tahun 2004, 2005, 2010, 2015 dan 2020 mendatang.
- b. Analisis Estimasi Nilai Produksi dihitung untuk tahun 2004, 2005, 2010, 2015 dan 2020 mendatang.
- c. Analisis Estimasi Jumlah Kunjungan Kapal dihitung untuk tahun 2004, 2005, 2010, 2015 dan 2020 mendatang.
- d. Analisis Estimasi Kebutuhan BBM dihitung untuk tahun 2004, 2005, 2010, 2015 dan 2020 mendatang.

3.3.4. Analisis SWOT

Analisis SWOT menurut Rangkuti, F (2000), adalah identifikasi secara sistematis antara kekuatan dan kelemahan dari faktor internal serta kesempatan dan ancaman dari faktor eksternal yang dihadapi suatu sektor, sehingga dapat dibuat suatu alternatif strategi. Strategi yang efektif adalah memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta meminimumkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis yang sekarang umum digunakan.

Dalam analisis data secara kuantitatif, digunakan alat bantu berupa :

1. Daftar fenomena yang mungkin menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
2. Tabel alat bantu untuk menganalisa fenomena yang ada.
3. Matriks IFE untuk evaluasi kekuatan dan kelemahan.
4. Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE), untuk mengevaluasi peluang dan ancaman dari kebijakan pengembangan PPI Banyutowo.

A. *Matriks Internal Factor Evaluation* (IFE), untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan pengembangan PPI Banyutowo, adalah:

- a. Mengidentifikasi faktor internal dengan cara menuliskan daftar kekuatan dan kelemahan yang dihadapi.
- b. Memberikan bobot pada setiap kekuatan dan kelemahan dengan range antara 0 - 1. Total bobot yang harus diberikan harus = 1.
- c. Memberikan rating 1 – 4 pada setiap kekuatan dan kelemahan.

4 = sangat kuat ; 3 = agak kuat ; 2 = lemah ; 1 = sangat lemah

- d. Mengalikan *bobot* dengan *rating* untuk mendapatkan *weight score*.
- e. Menjumlahkan *weight score* untuk mendapatkan nilai *total weight score*.

Nilai *TWS* ini akan berkisar antara 1 – 4.

Nilai 1 menunjukkan bahwa situasi internal sistem sangat buruk. Nilai 4 menunjukkan bahwa situasi internal sistem sangat baik. Nilai 2,5 menunjukkan sistem mampu merespon situasi internal secara rata-rata.

B. Matriks EFE, yaitu:

- a. Mengidentifikasi faktor eksternal dengan cara menuliskan peluang dan ancaman yang dihadapi.
- b. Memberikan bobot pada setiap peluang dan ancaman dengan range antara 0 – 1. Total bobot yang harus diberikan harus = 1 (satu).
- c. Memberikan rating dengan nilai antara 1 – 4 pada setiap peluang dan ancaman untuk mengindikasikan seberapa efektif pengambil kebijakan merespon peluang / ancaman yang ada.

4 = respon sangat baik

3 = respon diatas rata-rata

2 = respon rata-rata

1 = respon dibawah rata-rata

- d. Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan *weight score*.
- e. Menjumlahkan *weight score* untuk mendapatkan nilai *total weight score* (*TWS*). Nilai *TWS* ini akan berkisar antara 1 – 4. Nilai 1 menunjukkan bahwa dalam sistem tidak mampu memanfaatkan peluang untuk menghindari ancaman. Nilai 4 menunjukkan sistem saat ini telah dapat memanfaatkan peluang untuk menghindari ancaman. Nilai 2,5 menunjukkan sistem mampu merespon situasi eksternal secara rata-rata.

C. Matriks SWOT, untuk mengembangkan alternatif strategi.

Untuk melakukan matching antara : kekuatan dan peluang (*SO strategi*), yaitu : dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; kekuatan dengan ancaman (*ST strategi*), yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada; serta kelemahan dengan ancaman (*WT strategi*), yaitu : berusaha meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel 4. Matriks SWOT

Internal Faktor	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Eksternal faktor		
Opportunity (peluang)	SO strategi	WO strategi
Threat (ancaman)	ST strategi	WT strategi

Sumber : Kinnear dan Taylor (1983) *dalam* Sulistyaningrum (1997).

D. Matriks QSPM untuk memilih alternatif strategi terbaik, dimana ada 4 langkah dalam membuatnya, yaitu :

- a. Menuliskan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan.
- b. Memberikan bobot untuk masing-masing peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan. Bobot ini harus identik dengan bobot yang diberikan pada EFE dan IFE matriks.
- c. Menuliskan alternatif strategi yang dievaluasi.
- d. Bila faktor yang bersangkutan ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang dipertimbangkan. Berikan *attractiveness score* yang berkisar antara 1 – 4.

Nilai 1 = tidak dapat diterima
 2 = mungkin dapat diterima
 3 = kemungkinan besar dapat diterima
 4 = dapat diterima

3.3.5. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2003 sampai dengan Agustus 2003 bertempat di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara $110^{\circ},20'$ – $111^{\circ},15'$ BT dan $6^{\circ},25'$ – $7^{\circ},00'$ LS. Dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

4.1.1. Letak dan luas wilayah Desa Banyutowo

Desa Banyutowo berada di wilayah Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Jarak Desa Banyutowo adalah sekitar 95 km atau kurang lebih 3 jam perjalanan ke sebelah timur dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dan berjarak 20 km sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Pati. Luas wilayah Desa Banyutowo adalah 115,880 Ha, terdiri dari tanah sawah 22,190 Ha, pekarangan / bangunan 31,285 Ha, tambak/ kolam 60,655 Ha dan sungai, jalan, kuburan seluas 1,750 Ha.

4.1.2. Kependudukan

Pada bulan Agustus tahun 2003 jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Banyutowo berjumlah 684 dengan jumlah penduduk 2.612 orang, yang terdiri dari 1.327 orang laki-laki (51 %) dan 1.285 orang perempuan (49 %). Adapun komposisi jumlah penduduk di Desa Banyutowo menurut umur secara lengkap disajikan pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur (tahun)	Jumlah (orang)
1	0 – 4	223
2	5 – 9	314
3	10 – 14	341
4	15 – 19	201
5	20 – 24	291
6	25 – 29	353
7	30 – 39	373
8	40 – 49	286
9	50 – 59	149
10	60 keatas	81
	Jumlah	2.612

Sumber : Monografi Desa Banyutowo, Agustus 2003

Rasio beban tanggung adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk yang tidak produktif yaitu usia dibawah 19 tahun dan diatas 56 tahun; dengan jumlah penduduk yang termasuk usia produktif yaitu usia 19 – 55 tahun, (Wiro Suhardjo, 1981). Nilai rasio beban tanggung di Desa Banyutowo bulan Agustus tahun 2003 adalah 62, artinya setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 62 orang usia non produktif.

Daerah Desa Banyutowo merupakan daerah perikanan tangkap, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor nelayan. Penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap sebanyak 1.085 orang atau 41,54 %. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 569. orang atau 21,78 %.

Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaannya, dapat dilihat pada **Tabel 2:**

Tabel 2

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	108
2	Nelayan	1085
3	Pengusaha sedang / besar	9
4	Buruh tani	73
5	Buruh bangunan	6

6	Pedagang	569
7	Pengangkutan	14
8	PNS	14
9	ABRI	14
10	Pensiunan (PNS / ABRI)	28
11	Lain-lain	155
	Jumlah	2.075

Sumber : Monografi Desa Banyutowo, Agustus 2003

Dari jumlah penduduk di Desa Banyutowo sebanyak 2612 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2075 orang atau 79,44 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Sisanya merupakan penduduk yang belum atau tidak bekerja yaitu sebanyak 537 orang atau 20,56 %, termasuk didalamnya golongan usia kerja atau penduduk produktif yang terdiri dari ibu rumah tangga dan pelajar.

4.1.3. Administrasi Pemerintahan

Desa Banyutowo secara administrasi berada dalam lingkungan wilayah Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Dan secara keseluruhan terbagi lagi atas 1 Dusun, 2 RW dan 11 RT. Wilayah Desa Banyutowo dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Berdasarkan Kep. Mendagri No. 82 tahun 1984 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Wilayah Kecamatan, Camat mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes), Mantri Pamong Praja, Mawil Hansip dan Ketua RW. Sekretaris Desa (Sekdes) adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala Desa dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di kecamatan. Sekretaris Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dan membawahi urusan pemerintahan, urusan kemasyarakatan, urusan pembangunan masyarakat desa, dan urusan administrasi.

4.1.4. Pendidikan

Sarana pendidikan formal di Desa Banyutowo, yaitu Taman Kanak-Kanak hingga Madrasah Ibtidaiyah telah tersedia. Selain sarana pendidikan formal juga terdapat sarana pendidikan non formal yang berupa pendidikan ketrampilan yang dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan. Jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Banyutowo dapat dilihat pada **Tabel 3** berikut ini.

Tabel 3
Jumlah Sarana Pendidikan dan Tenaga Pengajar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (buah)	Jumlah Pengajar (Orang)	Jumlah Murid (Orang)
1.	TK	2	7	68
2.	SD Negeri	2	11	226
3	Madrasah Ibtidaiyah	1	9	98

Sumber : Monografi Desa Banyutowo, Agustus 2003

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri RI, Desa Banyutowo termasuk daerah yang tingkat pendidikannya sangat baik, karena jumlah penduduk yang tamat SD ke atas sebanyak 1.484 atau 56,81 %. Jumlah penduduk Desa Banyutowo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 4** dibawah ini.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk (Orang)
1.	Belum sekolah	27
2.	Tidak tamat SD	897
3.	Tamat SD / sederajat	827
4.	Tamat SLTP / sederajat	357
5.	Tamat SMU	269
6.	Tamat Akademi / PT	31
7.	Tidak tamat SD. SLTP, SMU dan Akademi/PT	204
	Jumlah	2.612

Sumber : Monografi Desa Banyutowo, Agustus 2003

4.1.5. Transportasi dan komunikasi

Prasarana jalan merupakan salah satu penunjang kegiatan ekonomi dan perhubungan yang sangat penting bagi masyarakat di Desa Banyutowo. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, masalah sarana transportasi di Desa Banyutowo sudah cukup baik dan lancar karena telah tersedianya prasarana jalanan serta sarana

angkutan. Prasarana jalan terdiri dari jalan kelas IV sepanjang 1,2 km (0,6 km kondisi bagus dan 0,6 km kondisi rusak), jalan kelas V sepanjang 2 km (1,5 km kondisi bagus dan 0,5 km kondisi rusak), jalur desa aspal sepanjang 2,8 km (2,0 km kondisi bagus dan 0,8 km kondisi rusak) dan jembatan 2 buah. Panjang jalan utama yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang 5 km.

Sarana angkutan yang ada di Desa Banyutowo terdiri dari mobil bis, angkutan pedesaan, delman dan sepeda motor. Di Desa Banyutowo sarana pengangkutan semuanya melalui lalu lintas darat. Sarana komunikasi yang terdapat di hampir setiap rumah penduduk adalah radio dan televisi. Sedangkan sarana komunikasi yang ada di Desa Banyutowo berupa ORARI 7 buah dan Kantor Pos dan Giro 1 buah untuk komunikasi lewat surat menyurat serta untuk komunikasi jarak jauh telah dijangkau dengan fasilitas telpon dimana di desa Banyutowo telah terpasang 21 buah sambungan telepon.

Sebagian besar penduduk telah menggunakan fasilitas listrik dari PLN. Untuk keperluan air minum sebagian besar penduduk menggunakan sumur, baik sumur bong (sumur biasa) maupun sumur bor yang menggunakan mesin sedot (Sanyo) atau pompa tangan.

4.1.6. Agama

Penduduk Desa Banyutowo sebagian besar beragama Islam, yaitu sebanyak 1.258 orang (48,16%), Katolik 22 orang (0,84%), Kristen Protestan 1.332 orang (51%). Selain itu di Kecamatan Dukuhseti terdapat Pondok Pesantren 37 buah, dengan kyai 37 orang, santri 4.293 orang, majelis taklim 37 buah, dengan jumlah jemaah 4.078 orang.

Jumlah sarana ibadah pemeluk agama Islam yang ada di Kecamatan Dukuhseti terdiri dari Masjid 36 buah dan Musholla / Surau 189 buah. Sedangkan untuk sarana ibadah pemeluk agama Katholik maupun Kristen Protestan berupa gereja sebanyak 2 buah.

4.1.7. Perekonomian

Sarana perekonomian merupakan salah satu sarana yang penting dalam rangka menunjang kelancaran pembangunan ekonomi khususnya untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Di Desa Banyutowo terdapat 3 buah pasar permanen yang masing-masing mempunyai bangunan permanen. Sedangkan toko di Desa Banyutowo terdapat sebanyak 11 buah, kios sebanyak 138 buah dan warung sebanyak 144 buah yang tersebar di seluruh desa wilayah Desa Banyutowo.

Selain pasar dan kios, di Desa Banyutowo juga terdapat 1 buah Koperasi Unit Desa, 4 buah Koperasi Produksi dan 4 Kantor Unit BRI. Keberadaan sarana perekonomian ini sangat menunjang kelancaran kegiatan perekonomian di Desa Banyutowo.

4.2. Analisis PPI Banyutowo.

Hasil evaluasi terhadap Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo, yang meliputi : kelengkapan fasilitas sarana prasarana, kondisi dan fungsi sarana prasarana, estimasi produksi dan nilai produksi, Nilai Indek Relatif, estimasi jumlah kunjungan kapal dan kebutuhan BBM yang ada adalah sebagai berikut:

4.2.1. Analisis Kelengkapan Fasilitas Saranan Dan Prasarana Pangkalan

Pendaratan Ikan Banyutowo.

Evaluasi tentang kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana PPI Banyutowo dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dari Direktorat Jenderal Perikanan tahun 1994. Adapun cara evaluasinya adalah membandingkan antara sarana dan prasarana berdasarkan Petunjuk Teknis dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lapangan. Penilaian kondisi PPI Banyutowo dilakukan terhadap beberapa atribut yang meliputi kelengkapan sarana-prasarana fasilitas: dasar, fungsional dan fasilitas pendukung, dikaitkan dengan analisis kondisi PPI. Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi kelengkapan sarana dan prasarana disajikan dalam **Lampiran 1**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari fasilitas sarana & prasarana dasar PPI Banyutowo yang harus ada, telah tersedia / terpenuhi sebanyak 80 % dan hanya 2 (dua) sarana & prasarana dasar yang belum tersedia (20 %) yaitu kolam pelabuhan dan drainase tetapi sudah dalam perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya. Fasilitas sarana & prasarana fungsional, dari 25 sarana & prasarana fungsional yang ada telah tersedia 20 (dua puluh) jenis fasilitas atau sebesar 80 %. Sedangkan fasilitas sarana & prasarana fungsional yang belum tersedia sebanyak 5 (lima) jenis fasilitas atau (20 %) yaitu : pabrik es, instalasi BBM, instalasi pengolah limbah, fasilitas docking kapal dan tempat istirahat nelayan. Semua masih dalam rangka perencanaan untuk pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo dimasa yang akan datang.

Untuk fasilitas sarana & prasarana pendukung, dari 8 (delapan) sarana & prasarana pendukung yang seharusnya ada, telah tersedia 5 (lima) atau 62,50 % Sedangkan 3 (tiga) atau 37,50 % sarana & prasarana yang belum tersedia yaitu: rumah dinas kepala PPI, mess operator dan cold storage. Yang belum tersedia sudah dalam perencanaan pembangunannya di waktu mendatang. Walaupun masih ada fasilitas sarana & prasarana yang belum tersedia, namun oprasional PPI Banyutowo sudah bisa berjalan dengan lancar mengingat 80 % sarana & prasarana fasilitas dasar dan fasilitas fungsional seperti ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan telah terpenuhi.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa rangkaian kegiatan di PPI Banyu - towo telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan persyaratan pelelangan ikan yang disyaratkan. Namun masih perlu peningkatan pelayanan dan mewujudkan kenyamanan pelayanan yang memadai.

Oleh karena itu pengembangan PPI Banyutowo perlu ditingkatkan, supaya dapat bersaing dengan tempat pelelangan ikan yang ada di sekitarnya dan juga dari luar Kabupaten terdekat, yaitu disebelah Barat adalah Kabupaten Jepara dan disebelah Timurnya adalah Kabupaten Rembang.

4.2.2. Kondisi Sarana & Prasarana PPI Banyutowo

Hasil penelitian terhadap kondisi sarana dan prasarana PPI Banyutowo terhadap 10 jenis sarana dan prasarana yang dilakukan pengkajian, berdasarkan jawaban dari 100 orang responden terpilih, adalah sebagaimana disajikan pada **Tabel 5** berikut ini:

Tabel 5. Kondisi Sarana dan Prasarana PPI Banyutowo Menurut Persepsi Masyarakat

No	Jenis Sarana & Prasarana	Kondisi
----	--------------------------	---------

		Baik (%)	Buruk (%)	Rusak (%)
1	Luas Tanah / Lahan	95	5	-
2	Dermaga	90	6	4
3	Turap penahan tanah	91	6	3
4	Jalan dalam komplek	96	2	2
5	Gedung TPI	95	4	1
6	Kantor administrasi	94	5	1
7	Toko/Waserda	92	8	-
8	MCK	53	25	22
9	Sarana ibadah	100	-	-
10	Instalasi listrik dan Genset	90	8	2

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2003

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa sarana & prasarana PPI Banyutowo menurut persepsi masyarakat mempunyai kondisi yang baik.

Luas tanah / lahan (1) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik dan memadai (95 %), buruk (5 %).

Begitu pula Dermaga (2) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (90 %), buruk (6 %) dan rusak (4 %). Turap penahan tanah (3) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (91 %), buruk (6 %) dan rusak (3 %). Jalan dalam komplek (4) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (96 %), buruk (2 %) dan rusak (2 %).

Gedung Tempat Pelelangan Ikan (5) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (95 %), buruk (4 %) dan rusak (1 %). Kantor Administrasi (6) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (94 %), buruk (5 %) dan rusak (1 %). Toko / Warung Serba Ada (7) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (92 %), buruk (8 %).

MCK (8) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (53 %), buruk (25 %) dan rusak (22 %). Sarana Ibadah (9) terlihat bahwa semua responden menyatakan dalam kondisi baik (100 %). Instalasi listrik dan Genset (10) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam kondisi baik (90 %), buruk (8 %) dan rusak (2 %). Hal ini telah sesuai dengan kondisi di lapangan, karena pada saat penelitian dilakukan sarana dan prasarana tersebut telah selesai dibangun.

4.2.3 Fungsi Sarana & Prasarana PPI Banyutowo

Hasil penelitian terhadap fungsi sarana dan prasarana PPI Banyutowo terhadap 10 jenis sarana dan prasarana yang dilakukan pengkajian, berdasarkan jawaban dari 100 orang responden terpilih, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Fungsi Sarana & Prasarana PPI Banyutowo Menurut Persepsi Masyarakat

No	Jenis Sarana & Prasarana	Fungsi
----	--------------------------	--------

		Berfungsi (%)	Tidak Berfungsi (%)
1	Luas Tanah / Lahan	90	10
2	Dermaga	100	-
3	Turap penahan tanah	98	2
4	Jalan dalam komplek	100	-
5	Gedung TPI	91	9
6	Kantor administrasi	88	12
7	Toko / Waserda	98	2
8	MCK	53	47
9	Sarana ibadah	100	-
10	Instalasi listrik dan Genset	95	5

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2003

Tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa sarana & prasarana PPI Banyutowo, menurut persepsi masyarakat mempunyai fungsi yang baik. Luas tanah (1) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (90%), tidak berfungsi (10 %).

Begitu pula Dermaga (2) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (100 %). Turap penahan tanah (3) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (98 %), tidak berfungsi (2 %). Jalan dalam komplek (4) terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (100 %).

Gedung Tempat Pelelangan Ikan (5), mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (91 %), tidak berfungsi (9 %). Kantor Administrasi (6), mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (88 %). Toko / Warung Serba Ada (7), bahwa mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (98 %), tidak berfungsi (2 %).

MCK (8), mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (53 %), tidak berfungsi (47 %). Sarana Ibadah (9), semua responden menyatakan berfungsi dengan baik (100 %). Instalasi listrik dan Genset (10), mayoritas responden menyatakan berfungsi dengan baik (95 %), tidak berfungsi (5 %). Hal ini telah sesuai dengan kondisi di lapangan, karena pada saat penelitian dilakukan sarana dan prasarana tersebut telah selesai dibangun.

4.2.4. Analisis Produksi Ikan di PPI Banyutowo

Berdasarkan hasil analisis terhadap produksi ikan yang didaratkan di PPI Banyutowo, ternyata setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,96 %. Hasil analisis produksi ikan selengkapnya tertera pada **Tabel 7** dibawah ini.

Tabel 7. Produksi Ikan di PPI Banyutowo Tahun 1999-2003

No.	Tahun	Total Produksi (Kg)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	1999	1,199,994	-
2	2000	2,382,667	98.55
3	2001	1,765,913	-25.88
4	2002	1,708,515	-3.25
5	2003	1,714,964	0.37
Jumlah		8,772,053	-
Rata-rata		1,754,411	13,96

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2003

Hasil analisis produksi ikan secara lengkap dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 seperti yang tertera pada **Lampiran 2**.

Dari hasil produksi ikan rata-rata sebesar 1.754.411 kg seperti tersebut diatas, maka dapat dihitung:

a. Luas Lantai Lelang, yaitu dengan menggunakan rumus: $S = \frac{P \times N}{R \times a}$

dimana: S = luas lantai lelang R = Intensitas lelang/hari

P = Produktifitas kapal a = Perbandingan luas Gedung

N = Penumpukan basket dan lantai lelang

$$S = \frac{1.754.411/11.571 \times 12}{1 \times 819/660} = \frac{151,62 \times 12}{1 \times 1,24} = 1.467,30 = 1.470 \text{ M}^2$$

Jadi kebutuhan **luas lantai lelang** sampai dengan **Th.2003** adalah = **1.470 M²**

b. Luas Lahan Parkir dan Retribusi Parkir

Hasil analisis estimasi produksi ikan untuk tahun 2004, 2005, 2010, 2015, 2020 yaitu seperti tertera pada **Tabel 8** dibawah ini.

Tabel 8. Estimasi Produksi Ikan di PPI Banyutowo

No.	Tahun	Total Produksi (Kg)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2004	1.825.763	-
2	2005	1.849.547	1,30
3	2010	1.968.469	6,43
4	2015	2.087.390	6,04
5	2020	2.206.312	5,69
Jumlah		10.249.716	-
Rata-rata		2.049.943	3,89

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2003

Hasil analisis estimasi produksi ikan secara lengkap seperti tertera pada **Lampiran 3**.

Dari hasil estimasi produksi ikan rata-rata sebesar 2.049.943 kg seperti tersebut diatas, maka dapat dihitung:

a. Luas Lantai Lelang, yaitu dengan menggunakan rumus: $S = \frac{P \times N}{R \times a}$

dimana: S = luas lantai lelang R = Intensitas lelang/hari
P = Produktifitas kapal a = Perbandingan luas Gedung
N = Penumpukan basket dan lantai lelang

$$S = \frac{2.049.943/13.104 \times 12}{1 \times 819/660} = \frac{156,44 \times 12}{1 \times 1,24} = 1.514 = 1.520 \text{ M}^2$$

Jadi kebutuhan **luas lantai lelang** sampai dengan **Th.2020** adalah = **1.520 M²**

b. Luas Lahan Parkir dan Retribusi Parkir

Dari total nilai produksi, 0,95 % nya adalah kontribusi retribusi lelang yang merupakan PAD untuk Kabupaten Pati. Adapun analisisnya seperti tertera pada **Tabel 9** dibawah ini.

Tabel 9. Analisis Nilai Produksi Dan Hasil Retribusi Lelang Sebesar 0,95 % Tahun 1999-2003

No	Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Retribusi 0,95 % (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	1999	2.893.271.700	274.860.811,50	-
2	2000	5.966.623.500	566.829.232,50	106,22
3	2001	4.116.615.000	391.078.425,00	- 31,01
4	2002	4.177.310.000	396.844.450,00	1,47
5	2003	3.935.967.000	373.916.865,00	- 5,78
Jumlah		21.089.787.200	2.003.529.784,00	-
Rata-rata		4.217.957.440	400.705.956,80	14,18

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2003

Gambaran analisis nilai produksi secara lengkap tersaji pada **Lampiran 4**.

4.2.7. Analisis Estimasi Nilai Produksi Ikan Dan Hasil Retribusi Lelang Sebesar 0,95 % di PPI Banyutowo.

Hasil analisisnya seperti tertera pada **Tabel 10** dibawah ini:

Tabel 10. Analisis Estimasi Nilai Produksi Ikan Dan Hasil Retribusi Lelang Sebesar 0,95 % di PPI Banyutowo.

No	Tahun	Estimasi Nilai Produksi (Rp)	Retribusi Lelang 0,95 % (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	2004	4.790.992.644	455.144.301,20	-
2	2005	4.867.774.596	452.438.586,60	1,60
3	2010	5.251.684.356	498.910.013,80	7,89
4	2015	5.635.594.116	535.381.441,00	7,31
5	2020	6.019.503.876	571.852.868,20	6,81
Jumlah		26.565.549.588	2.523.727.210,80	-
Rata-rata		5.313.109.918	504.745.442,16	4,72

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2003

Gambaran analisis estimasi nilai produksi secara lengkap tersaji pada **Lampiran 5**.

4.2.7.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati Dari Sektor Perikanan

Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pati dari sektor perikanan berasal dari Balai Benih Ikan, Tambak Dinas dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Balai Benih Ikan (BBI) adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dimana dalam kegiatan sehari-harinya mengelola kolam-kolam yang ada di BBI guna memenuhi kebutuhan induk dan benih dari hasil seleksi budidaya ikan air tawar yang hasilnya dijual kepada para pembudidaya ikan.

Tambak Dinas merupakan tambak milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, tambak tersebut disewakan kepada siapa saja dengan penawaran harga tertinggi dan menggunakan sistim kontrak tahunan.

Sumber Pendapatan dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ini berasal dari kumpulan retribusi 0,95 % nilai produksi ikan yang dilelang diseluruh PPI yang ada di Kabupaten Pati.

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang besarnya pendapatan tersebut seperti tertera pada **Tabel 11** berikut ini :

Tabel 11: Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perikanan.

T	Sumber Pendapatan Asli Daerah Pati		
	Balai Benih Ikan	Tambak Dinas	Pangkalan Pendaratan Ikan
1999	-	6.900.000	586.480.568
2000	7.850.000	14.000.000	1.000.000.000
2001	6.000.000	18.000.000	800.170.031
2002	6.000.000	28.000.000	1.573.547.264
2003	6.500.000	30.000.000	1.384.753.109

4.2.8 Analisis Indeks Relatif

Indeks relatif dihitung untuk mengetahui kondisi PPI Banyutowo layak dikembangkan atau tidak dan apakah pemasaran ikan di PPI Banyutowo bisa lebih baik dari PPI yang ada diseluruh Kabupaten Pati. Nilai I (Indeks Relatif) ini apabila : $I > 1$, artinya kualitas pemasaran ikan di PPI Banyutowo lebih baik daripada kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Pati, serta PPI Banyutowo layak untuk dikembangkan.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan Nilai Indeks Relatif Produksi ikan di PPI Banyutowo tersaji pada **Tabel 12** dibawah ini.

Tabel 12. Analisis Nilai Indeks Relatif Produksi Ikan di PPI Banyutowo**Tahun 1999-2003**

Tahun	Np Banyutowo	Nt Kab.Pati	Qp Banyutowo	Qt Kab.Pati	I	Keter- angan
1999	1,199,994	41,216,948	2,893,271,700	104,246,440,300	1.049	> 1
2000	2,382,667	37,587,106	5,966,623,500	103,393,482,800	1.098	> 1
2001	1,765,913	39,931,199	4,116,615,000	125,266,047,750	1.346	> 1
2002	1,708,515	50,899,753	4,177,310,000	165,644,157,000	1.331	> 1
2003	1,312,991	47,122,135	2,874,794,000	137,103,333,900	1.329	> 1

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2003

Dari hasil pembahasan analisis indeks relatif produksi dan nilai produksi di PPI Banyutowo, ternyata nilai I yang didapat adalah : $I > 1$.

Ini menunjukkan bahwa kualitas pemasaran ikan di PPI Banyutowo lebih baik dari pada kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Pati.. Data pembahasan hasil analisis selengkapnya tersaji pada **Lampiran 6**.

4.2.9 Analisis Kunjungan Kapal Ikan di PPI Banyutowo**Tahun 1999-2003**Analisis data kunjungan kapal adalah seperti **Tabel 13** di bawah ini.**Tabel 13. Analisis Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo Tahun 1999-2003**

No	Tahun	Kapal Motor			Prosentase (%)
		110 PK	25 PK	Jumlah	
1	1999	-	4.071	4.071	-
2	2000	185	19.086	19.271	373,37
3	2001	21	12.520	12.541	-34,92
4	2002	3	11.478	11.481	-8,45
5	2003	-	10.492	10.492	-8,61
Jumlah		209	57.647	57.856	-

Rata-rata			11.571	64,28
------------------	--	--	---------------	--------------

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2003

Dari hasil evaluasi kunjungan kapal ikan yang mendaratkan ikan dan melakukan kegiatan bongkar / lelang ikan di PPI Banyutowo setiap tahunnya rata-rata sebanyak 11.571 kapal atau 964 kapal/bulan. Dengan asumsi lebar kapal rata-rata = 3,4 m, maka panjang dermaga standart dapat dihitung dengan rumus: $L = (M/W) \times B \times 1,2$ dimana :

L = panjang dermaga (M')

M = jumlah kunjungan kapal per bulan (unit)

W = periode penggunaan dermaga (jam)

B = lebar kapal

Dengan rumus diatas, maka panjang dermaga standart sampai dengan tahun 2003 adalah : $L = (964 / 14) \times 3,4 \times 1,2$

$$= 68,86 \times 3,4 \times 1,2 = 280,94 \text{ M}' = 281 \text{ M}'$$

Jadi **panjang dermaga standart sampai tahun 2003** adalah = **281 M'**

Sedangkan dermaga yang ada saat ini sepanjang 250 m'. Oleh karena itu panjang dermaga yang ada masih kurang sekitar = 31 M'.

Dari hasil perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa panjang dermaga yang tersedia di PPI Banyutowo pada saat ini masih kurang, maka sudah selayaknya kalau PPI Banyutowo segera menyesuaikan diri untuk dikembangkan, karena dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan pemberian pelayanan yang prima bagi kapal-kapal yang berkunjung dan melakukan kegiatan pelelangan ikan mutlak diperlukan.

Data kunjungan kapal selengkapnya tertera pada **Lampiran 7**.

4.2.10 Analisis Estimasi Kunjungan kapal di PPI Banyutowo

Hasil analisis estimasi kunjungan kapal ikan di PPI Banyutowo, tersaji pada **Tabel 14** di bawah ini.

Tabel 14. Analisis Estimasi Kunjungan Kapal di PPI Banyutowo

No.	Tahun	Kunjungan kapal	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2004	12.040	-
2	2005	12.197	1,30
3	2010	12.979	6,41
4	2015	13.760	6,02
5	2020	14.542	5,70
Jumlah		65.519	-
Rata-rata		13.104	3,89

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2003

Hasil analisis estimasi kunjungan kapal ikan yang mendaratkan dan melelangkan ikannya di PPI Banyutowo tertera pada **Lampiran 8**.

Dari hasil estimasi kunjungan kapal ikan yang mendaratkan ikan dan melakukan kegiatan bongkar / lelang ikan di PPI Banyutowo setiap tahunnya rata-rata sebanyak 13.104 kapal atau 1.092 kapal/bulan. Dengan asumsi lebar kapal rata-rata = 3,4 m, maka estimasi panjang dermaga standart dapat dihitung dengan rumus: $L = (M/W) \times B \times 1,2$ dimana :

L = panjang dermaga (M')

M = jumlah kunjungan kapal per bulan (unit)

W = periode penggunaan dermaga (jam)

B = lebar kapal

Dengan rumus diatas, maka panjang dermaga standart sampai dengan tahun 2020 adalah : $L = (1.092 / 14) \times 3,4 \times 1,2$

$$= 78 \times 3,4 \times 1,2 = 318 \text{ M}'$$

Jadi estimasi **panjang dermaga sandart** yang dibutuhkan oleh Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo sampai dengan **tahun 2020** adalah = **318 M'**.

4.2.11. Analisis Kebutuhan BBM

Kebutuhan BBM kapal ikan dihitung dengan rumus: $PK \times 0,2 \text{ l/jam}$

- Kapal motor dengan **mesin 110 PK** memerlukan waktu 15 hari untuk setiap trip, dengan waktu operasional / hari = 10 jam, maka **dibutuhkan BBM** : $(110 \times 0,2) \times 15 \times 10 = 3.300 \text{ liter / trip}$.
- Untuk kapal motor dengan **mesin 25 PK** memerlukan waktu 1 hari untuk setiap trip, dengan waktu operasional / hari = 8 jam, maka **dibutuhkan BBM** sebanyak: $(25 \times 0,2) \times 8 = 40 \text{ liter / trip}$.

Data kebutuhan BBM bagi kapal nelayan di PPI Banyutowo dari tahun 1999 sampai dengan 2003, seperti tersebut pada **Tabel 15** di bawah ini.

Tabel 15. Analisis Kebutuhan BBM di PPI Banyutowo Tahun 1999-2003

No.	Tahun	Kebutuhan BBM (liter)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	1999	162.840	-
2	2000	1.373.940	743,74
3	2001	570.500	-58,48
4	2002	469.140	-17,77
5	2003	419.680	-10,54
Jumlah		2.996.100	-
Rata-rata		599.220	131,39

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2003

Dengan kebutuhan rata-rata BBM sebesar 599.220 liter per tahun, sedangkan SPBU yang ada sangat jauh letaknya, yaitu kurang lebih berjarak 10-15 Km, karena

berada di Kota Tayu. Hal ini akan menghambat kegiatan pengisian perbekalan bagi kapal ikan yang siap melaut. Berdasarkan data kebutuhan BBM tersebut ternyata PPI Banyutowo tidak bisa memenuhinya. Oleh karena itu bahwa penyediaan sarana kebutuhan BBM bagi kapal ikan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, sehingga sudah secepatnya dalam pengembangannya nanti PPI Banyutowo bisa menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Data kebutuhan BBM bagi kapal ikan yang mendarat dan melakukan pelelangan di PPI Banyutowo tersaji dalam **Lampiran 9**.

4.2.12. Analisis Estimasi Kebutuhan BBM

Hasil analisis estimasi kebutuhan BBM bagi nelayan di PPI Banyutowo, seperti tersebut pada **Tabel 16** di bawah ini.

Tabel 16. Analisis Estimasi Kebutuhan BBM di PPI Banyutowo

No.	Tahun	Kebutuhan BBM (liter)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2004	998.435	-
2	2005	1.047.000	4,86
3	2010	1.289.828	23,19
4	2015	1.532.656	18,83
5	2020	1.775.484	15,84
Jumlah		6.643.403	-
Rata-rata		1.328.681	12,54

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2003

Analisis estimasi kebutuhan BBM tercantum dalam **Lampiran 10**.

Sedangkan model Regresi untuk estimasi: produksi, nilai produksi, jumlah kunjungan kapal, jumlah kebutuhan BBM ada di **Lampiran 11** sampai dengan **Lampiran 14**.

4.3. Hasil Analisis PPI Banyutowo

Analisis SWOT yang dilakukan pada PPI Banyutowo digunakan untuk mengetahui pengembangan apa saja yang bisa dan harus dilakukan di PPI Banyutowo serta seberapa besar kemungkinan pengembangan tersebut dilaksanakan. Di mana hasil dari pengembangan PPI tersebut mempunyai dampak positif terhadap kegiatan yang ada, baik di dalam maupun di luar lingkungan PPI. Tahap awal pelaksanaan analisis SWOT pada PPI Banyutowo kita bagikan kuisisioner seperti pada **Lampiran 15**, dan dengan melakukan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada PPI tersebut. Setelah kita melakukan identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman, maka didapatkan hasil analisisnya tertera pada halaman berikut ini.

4.3.1. Faktor Internal

4.3.1.1. Kekuatan dari Faktor Internal

Kekuatan faktor internal meliputi *perkembangan produksi ikan, sumberdaya manusia, jumlah kapal, fasilitas PPI dan koordinasi dengan instansi terkait*. Hasil analisisnya tertera pada **Tabel 17** di bawah ini :

Tabel 17. Analisis Faktor Internal (Kekuatan)

N0	FAKTOR INTERNAL (Kekuatan)	NILAI	KONDISI
1	PERKEMBANGAN PRODUKSI IKAN	4,00	SANGAT KUAT
2	SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN	2,00	LEMAH
3	JUMLAH KAPAL	3,00	KUAT
4	FASILITAS PPI BANYUTOWO	2,00	LEMAH
5	KOORDINASI DENGAN INSTANSI	1,00	SANGAT

	TERKAIT		LEMAH
--	---------	--	-------

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2003

Dengan memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa :

1. Perkembangan produksi dan nilai produksi ikan laut yang didaratkan di PPI Banyutowo merupakan suatu potensi yang besar guna mendukung berkembangnya PPI tersebut.
2. Sumberdaya Manusia yang melakukan aktifitas di PPI yaitu: bakul ikan, nelayan dan karyawan TPI kualitasnya masih kurang.
3. Jumlah kapal ikan yang mendaratkan dan melelangkan ikan hasil tangkapan terus meningkat .
4. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di PPI Banyutowo masih perlu untuk dikembangkan lagi..
5. Hubungan kerja (koordinasi) antar instansi terkait dan mitra kerja perlu ditingkatkan lagi.

4.3.1.2. Kelemahan dari Faktor Internal

Kelemahan yang ada terdapat pada *sanitasi dan higienis, pelayanan kepada pelanggan, tingkat keamanan dan kondisi mutu hasil tangkapan*. Hasil analisis kelemahan faktor internal tertera pada **Tabel 18** di bawah ini :

Tabel 18. Analisis Faktor Internal (Kelemahan)

N0	FAKTOR INTERNAL (Kelemahan)	NILAI	KONDISI
1	SANITASI DAN HIGIENIS	1,00	SANGAT LEMAH
2	PELAYANAN KEPADA PELANGGAN	2,00	LEMAH
3	TINGKAT KEAMANAN	4,00	SANGAT KUAT
4	KONDISI MUTU HASIL TANGKAPAN	3,00	KUAT

Dengan memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa :

1. Penanganan ikan hasil tangkap di atas kapal, kondisi lantai lelang dan kondisi saluran di PPI masih kurang memenuhi persyaratan.
2. Pelayanan kepada pelanggan yang meliputi pelelangan, pembayaran dan perbekalan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan .
3. Tingkat keamanan yang ada di PPI Banyutowo sudah memadai.
4. Kondisi mutu ikan hasil tangkap yang diawetkan dengan es maupun garam cukup bagus.

KETERANGAN :

PENILAIAN SKOR KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN

NO	NILAI	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
1.	4	SANGAT KUAT	SANGAT LEMAH	SANGAT BERPELUANG	SANGAT MENGANCAM
2.	3	KUAT	LEMAH	BERPELUANG	MENGANCAM
3.	2	KURANG KUAT	KURANG LEMAH	KURANG BERPELUANG	KURANG MENGANCAM
4.	1	TIDAK KUAT	TIDAK LEMAH	TIDAK BERPELUANG	TIDAK MENGANCAM

Nilai adalah angka hasil penilaian dari responden

Contoh Perhitungan Nilai:

Sub Faktor	Nilai	Jumlah Responden	Jumlah nilai	Rating
PRODUKSI IKAN LAUT	1	5	5	
	2	10	20	
	3	10	30	
	4	75	300	
Jumlah Total		100	355	3,55

4.3.2. Faktor Eksternal

4.3.2.1. Peluang dari Faktor Eksternal

Peluang dari faktor eksternal meliputi : *dukungan pemerintah untuk pengembangan PPI Banyutowo, pangsa pasar hasil tangkapan, perkembangan pengolahan ikan, dan keberadaan lembaga keuangan.* Hasil analisis peluang faktor eksternal tertera pada **Tabel 19** di bawah ini :

Tabel 19. Analisis Faktor Eksternal (Peluang)

N0	FAKTOR EKSTERNAL (Peluang)	NILA I	KONDISI
1	DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PENGEMBANGAN PPI BANYUTOWO	4,00	SANGAT BERPELUANG
2	PANGSA PASAR HASIL TANGKAP	3,00	BERPELUANG
3	PERKEMBANGAN PENGOLAHAN IKAN	2,00	KURANG BERPELUANG
4	KEBERADAAN LEMBAGA KEUANGAN	3,00	BERPELUANG

Dengan memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa :

1. Dukungan pemerintah untuk pengembangan PPI Banyutowo yang meliputi alokasi dana pengembangan dan dana pemeliharaan merupakan peluang untuk mengembangkan PPI tersebut.
2. Pangsa pasar ikan hasil tangkapan yang melibatkan bakul ikan dan rantai jalur distribusi pemasaran yang baik berpeluang untuk pengembangan PPI.
3. Perkembangan pengolahan ikan yang meliputi perkembangan pengolahan dan hasil olahannya kurang berpeluang bagi perkembangan PPI.

4. Keberadaan Lembaga Keuangan yaitu unit permodalan bakul ikan dan perbankan di sekitar lokasi PPI juga mempunyai peluang dalam perkembangan PPI.

4.3.2.2. Ancaman dari Faktor Eksternal

Ancaman dari faktor eksternal meliputi : *keberadaan PPI Lain yang berdekatan dengan PPI Banyutowo, perkembangan produksi ikan yang tidak dilelang, meningkatnya penggunaan alat tangkap terlarang, dan konflik antar nelayan.* Hasil analisis ancaman faktor eksternal tertera pada **Tabel 20** di bawah ini :

Tabel 20. Faktor Eksternal (Ancaman)

N0	FAKTOR EKSTERNAL (ancaman)	NILA I	KONDISI
1	KEBERADAAN PPI LAIN YANG BERDEKATAN DENGAN PPI BANYUTOWO	4,00	SANGAT MENGANCAM
2	PERKEMBANGAN PRODUKSI IKAN YANG TIDAK DILELANG	3,00	MENGANCAM
3	MENINGKATNYA PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TERLARANG	2,00	KURANG MENGANCAM
4	KONFLIK ANTAR NELAYAN	1,00	TIDAK MENGANCAM

- Dengan memperhatikan tabel di halaman sebelumnya terlihat bahwa :
1. Keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan lain yang berdekatan dengan Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo, akan sangat mengancam eksistensi dari Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo itu sendiri. Jarak

antar Pangkalan Pendaratan Ikan yang berdekatan mempunyai banyak dampak negatif bagi kedua PPI tersebut.

2. Perkembangan produksi ikan yang tidak di lelang di Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo dapat mengancam, karena akan menurunkan pendapatan dari Pangkalan Pendaratan Ikan tersebut.
3. Meningkatnya penggunaan alat tangkap terlarang yang tidak terlalu banyak kurang mengancam keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan
4. Konflik antar nelayan yang terjadi di kabupaten ataupun propinsi tetangga tidak mengancam dan merugikan eksistensi PPI .

Hasil dari penilaian responden terhadap kondisi faktor Internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta kondisi faktor Eksternal yang meliputi peluang dan ancaman tertera pada **Lampiran 16**.

4.3.3. Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Hasil dari pada identifikasi faktor internal dan faktor eksternal seperti yang diterangkan di atas dapat dirangkum seperti tertera **Tabel 21** berikut ini :

Tabel 21. Analisis Hasil Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

NO	FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
1	<p>KEKUATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan produksi ikan • Sumberdaya manusia perikanan • Jumlah kapal • Fasilitas PPI Banyutowo • Koordinasi dengan Instansi terkait 	<p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah untuk pengembangan PPI Banyutowo • Pangsa pasar hasil tangkapan • Perkembangan pengolahan ikan • Keberadaan lembaga keuangan

2	<p>KELEMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanitasi dan higienis • Pelayanan kepada pelanggan • Tingkat keamanan • Kondisi mutu hasil tangkapan 	<p>ANCAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan PPI lain yang berdekatan dengan PPI Banyutowo • Perkembangan produksi ikan yang tidak dilelang • Meningkatnya penggunaan alat tangkap terlarang • Konflik antar nelayan
---	---	---

4.3.4. Pembobotan

- Bobot atau tingkat kepentingan bagi faktor eksternal maupun internal ditentukan sebagai berikut :

Bobot	Keterangan
0,20 atau 20 %	tinggi atau kuat
0,15 atau 15 %	di atas rata-rata
0,10 atau 10 %	rata-rata
0,05 atau 5 %	di bawah rata-rata
0,00 atau 0 %	tidak terpengaruh

- Jumlah bobot seluruh faktor eksternal yang ada di matriks EFE harus sama dengan 1 atau 100 %
- Jumlah bobot seluruh faktor internal yang ada di matriks IFE harus sama dengan 1 atau 100 %.

Untuk mendapatkan bobot disebarkan kuisioner seperti yang tercantum pada **Lampiran 17**. Sedangkan hasil penghitungan bobot dari external factor evaluation (EFE) dan internal factor evaluation (IFE) seperti tercantum pada **Lampiran 18**.

4.3.5. Pemberian Rating

Pemberian rating diperlukan untuk mengetahui besarnya penilaian responden terhadap faktor-faktor yang ada di PPI Banyutowo dengan cara mengedarkan kuisisioner seperti tercantum pada Lampiran 19. Sedangkan hasil tabulasi jawaban responden terpilih tertera pada Lampiran 22.

4.3.6. Penentuan Attractive Score

Attractive Score adalah daya tarik dari masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menentukan **Strategi Pengembangan**. Hasil dari penentuan attractive score digunakan untuk menentukan strategi masing-masing faktor internal dan eksternal yang berguna bagi pengembangan PPI Banyutowo, adapun form kuisisioner seperti tertera pada **Lampiran 21**. Sedangkan strategi-strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- ❖ Melengkapi dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana
- ❖ Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi
- ❖ Meningkatkan kebersihan PPI dan mutu ikan hasil tangkapan
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan
- ❖ Menjalin kerjasama yang baik antara nelayan, bakul ikan dan aparat
- ❖ Membuat kesepakatan bersama dalam penangkapan ikan
- ❖ Penegakan hukum
- ❖ Peningkatan Pembinaan kepada *Stake Holder*

Adapun penilaian dari responden untuk masing-masing strategi besarnya mengacu kepada :

- 1** : berarti *tidak menarik (tidak prioritas)*
- 2** : berarti *kurang menarik (kurang prioritas)*
- 3** : berarti *menarik (prioritas)*
- 4** : berarti *sangat menarik (sangat prioritas)*

Hasil selengkapnya dari attractive score untuk masing-masing strategi dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

4.4. Analisis SWOT PPI Banyutowo

Analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan PPI Banyutowo dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Pati. Analisis SWOT ini bersifat kualitatif yang dapat dipergunakan untuk menentukan besarnya skor dari berbagai faktor secara sistematis untuk memformulasikan strategi kegiatan yang akan diterapkan. Di dalam melakukan analisis ini, akan dilihat kombinasi berbagai faktor yang meliputi faktor internal dan eksternal dari kegiatan manajemen pengembangan PPI Banyutowo. Faktor internal yang dimaksud meliputi **kekuatan** (*strength*) dan **kelemahan** (*weakness*) dan sering disingkat dengan **IFAS** (*Internal Factors Analysis Strategic*). Sedangkan faktor eksternal meliputi **peluang** (*opportunities*) dan **ancaman** (*threats*) atau biasa disingkat dengan **EFAS** (*External Factors Analysis Strategic*).

Tahap awal penggunaan dari analisis SWOT yaitu dengan menentukan besarnya skor dari faktor-faktor IFAS dan EFAS. Penentuan besarnya skor dari masing-masing faktor tersebut harus dilakukan secara cermat sebab pada tahap awal inilah yang merupakan kunci terhadap penentuan langkah-langkah selanjutnya. Adapun hasil penghitungan skor dari faktor internal dan eksternal tersaji pada **Tabel 22** dan **Tabel 23** berikut ini.

Tabel 22. Hasil penghitungan Internal Factor Analysis Strategic (IFAS)

No	Kekuatan (S)	Bobot (B)	Rating (R)	Score	Kode
1.	Perkembangan prod. Ikan	0,16	4	0,64	1.1
2.	SDM perikanan	0,18	2	0,36	1.2
3.	Jumlah kapal	0,09	3	0,27	1.3
4.	Fasilitas PPI Banyutowo	0,08	2	0,16	1.4
5.	Koordinasi dengan instansi terkait	0,08	1	0,08	1.5
	Kelemahan (W)				
1.	Sanitasi dan higienis	0,13	1	0,13	2.1
2.	Pelayanan pada pelanggan	0,14	2	0,28	2.2
3.	Tingkat keamanan	0,07	4	0,28	2.3
4.	Kondisi mutu hasil tangkap	0,07	3	0,21	2.4
	Jumlah Total IFAS	1,00		2,41	

Tabel 23. Hasil penghitungan External Factor Analysis Strategic (EFAS)

No	Peluang (O)	Bobot (B)	Rating (R)	Score	Kode
1.	Dukungan Pemerintah untuk pengembangan PPI	0,18	4	0,72	3.1
2.	Pangsa pasar hasil tangkap	0,17	3	0,51	3.2
3.	Perkembangan pengolahan ikan	0,09	2	0,18	3.3
4.	Keberadaan lembaga keuangan	0,08	3	0,24	3.4
	Ancaman (T)				
1.	Keberadaan PPI lain yang berdekatan	0,13	4	0,52	4.1
2.	Perkembangan produksi ikan yang tidak dilelang	0,14	3	0,42	4.2
3.	Meningkatnya penggunaan alat tangkap terlarang	0,11	2	0,22	4.3
4.	Konflik antar nelayan	0,10	1	0,10	4.4
	Jumlah Total EFAS	1,00		2,91	

Tabel 22 dan 23 menunjukkan bahwa secara kualitatif kegiatan, sarana dan prasarana yang ada di PPI Banyutowo, mempunyai dampak positif yang lebih besar jika

dibandingkan dengan dampak negatifnya bagi pengembangan PPI tersebut. Hal ini nampak pada hasil skor faktor eksternal yang besarnya = 2,91 sedangkan skor faktor internalnya = 2,41. Skor faktor eksternal yang lebih besar daripada skor faktor internal menunjukkan bahwa manajemen dan sarana prasarana yang ada di PPI Banyutowo masih berpotensi untuk dapat dikembangkan lagi dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Pati

Setelah melakukan penghitungan skor baik faktor internal maupun faktor eksternal kegiatan berikutnya adalah melakukan analisis untuk merumuskan suatu strategi. Dalam menentukan strategi metode yang digunakan adalah **Matrik SWOT**. Matrik ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Disamping itu, matrik ini juga mampu menghasilkan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Menurut Rangkuti (2002) matrik ini dapat menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi yaitu :

- ◆ **Strategi SO**, yaitu strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang ada sebesar-besarnya.
- ◆ **Strategi ST**. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
- ◆ **Strategi WO**. Penerapan strategi ini memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- ♦ **Strategi WT.** Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dari hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal tersebut di atas maka didapatkan alternatif strategi pada **Tabel 24** berikut ini :

Tabel 24. Matriks Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan produksi ikan 2. SDM perikanan 3. Jumlah kapal 4. Fasilitas PPI Banyutowo 5. Koordinasi dengan instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitasi dan Higienis 2. Pelayanan pada pelanggan 3. Tingkat keamanan 4. Kondisi mutu hasil tangkap
PELUANG (O)	S – O	W – O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah untuk pengembangan PPI Banyutowo 2. Pangsa pasar hasil tangkap 3. Perkembangan pengolahan ikan 4. Keberadaan lembaga keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana PPI Banyutowo b. Memperkuat jaringan pemasaran dan distribusi 	<ol style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan kebersihan PPI Banyutowo dan mutu hasil tangkap d. Meningkatkan kualitas pelayanan
ANCAMAN (T)	S – T	W – T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan PPI lain yang berdekatan 2. Perkembangan produksi ikan yang tidak dilelang 3. Meningkatnya penggunaan alat tangkap terlarang 4. Konflik antar nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> e. Menjalin kerjasama yang baik antara nelayan, bakul ikan dan aparat f. Membuat kesepakatan bersama dalam kegiatan penangkapan ikan 	<ol style="list-style-type: none"> g. Penegakan hukum h. Peningkatan pembinaan kepada <i>stakeholder</i>

--	--	--

4.5. MATRIKS QSP (Quantitative Strategies Planning)

QSPM (*Quantitative Strategies Planning Matrix*) adalah alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan terhadap alternatif strategi secara obyektif berdasarkan kunci dari keberhasilan faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. (Husein Umar, 2001). Selanjutnya disebutkan bahwa secara konseptual, tujuan daripada QSPM adalah untuk menerapkan kemenarikan relatif dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih untuk menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, yaitu antara perkalian bobot dan rating antara faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) serta mengacu pada hasil analisis alternatif strategi yang telah didapat, maka didapatkan bobot dan prioritas dari masing-masing alternatif strategi, sebagaimana tertera pada **Tabel 25** di bawah ini:

Tabel 25. Tabulasi Pembobotan Strategi Dari Matrik QSP

	Pembobotan	Total Bobot	Prioritas
S – O			
a.	1.2 + 1.3 + 1.4 + 3.1 + 3.3 + 3.4	1,93	1
b.	1.1 + 1.3 + 1.5 + 3.2	1,50	4
S – T			
g.	1.1 + 1.3 + 1.5 + 4.1 + 4.3 + 4.4	1,83	2
h.	1.2 + 1.4 + 4.2 + 4.4	1,04	8
W-O			
c.	2.1 + 2.3 + 2.4 + 3.1 + 3.3	1,52	3
d.	2.2 + 2.4 + 3.2 + 3.4	1,24	7
W-T			

e.	2.1 + 2.3 + 2.4 + 4.1 + 4.3	1,36	5
f.	2.2 + 2.3 + 4.2 + 4.3 + 4.4	1,30	6

Keterangan:

- S-O, S-T, W-O, W-T adalah merupakan alternatif strategi
- 1.1 s/d 4.4 adalah merupakan kode dari hasil penghitungan IFAS dan EFAS
- 1 s/d 8 adalah merupakan angka prioritas yang didapat untuk merekomendasikan alternatif strategi pengembangan

Hasil pembobotan antara kekuatan (**S**) dan peluang (**O**) didapatkan nilai total bobot untuk:

- a. melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana PPI Banyutowo = 1,93
- b. memperkuat jaringan pemasaran dan distribusi = 1,50

Hasil pembobotan antara kelemahan (**W**) dan peluang (**O**) didapatkan nilai total bobot untuk:

- c. meningkatkan kebersihan PPI Banyutowo dan mutu hasil tangkap = 1,52
- d. meningkatkan kualitas pelayanan = 1,24

Hasil pembobotan antara kelemahan (**W**) dan ancaman (**T**) didapatkan nilai total bobot untuk:

- e. menjalin kerjasama yang baik antara nelayan, bakul ikan dan aparat = 1,36
- f. membuat kesepakatan bersama dalam kegiatan penangkapan ikan = 1,30

Hasil pembobotan antara kekuatan (**S**) dan ancaman (**T**) didapatkan nilai total bobot untuk:

- g. penegakan hukum = 1,83
- h. peningkatan pembinaan kepada *stakeholder* = 1,04

Dari hasil penghitungan pembobotan berdasarkan matrik QSPM seperti yang tersebut di atas, maka didapatkan alternatif strategi urutan prioritas untuk pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Banyutowo, yaitu sebagai berikut:

1. Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana PPI Banyutowo
2. Penegakan hukum
3. Meningkatkan kebersihan PPI Banyutowo dan mutu ikan hasil tangkap
4. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi ikan
5. Menjalin kerjasama yang baik antara nelayan, bakul ikan dan aparat
6. Membuat kesepakatan bersama dalam kegiatan penangkapan ikan
7. Meningkatkan kualitas pelayanan
8. Peningkatan pembinaan kepada *stakeholder*

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari fasilitas sarana dan prasarana pokok dan fungsional PPI Banyutowo yang harus ada, telah tersedia / terpenuhi sebanyak 80 % dan hanya 20 % yang belum terpenuhi sehingga perlu untuk dikembangkan.
2. Untuk fasilitas sarana dan prasarana pendukung, baru terpenuhi 62,50%, oleh karena itu pengembangannya sangat mendesak untuk dilaksanakan.
3. Hasil penelitian menunjukkan indeks relatif nilai produksi (I) adalah sebesar = 1,3188. Untuk nilai $I > 1$ berarti bahwa kualitas pemasaran ikan di daerah Banyutowo lebih baik daripada kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Pati.
4. Berdasarkan perhitungan analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai untuk faktor eksternal (EFAS) adalah = 2,91. Sedangkan untuk faktor internalnya (IFAS) adalah = 2,41. Dengan nilai EFAS > nilai IFAS, berarti bahwa dengan dikembangkannya PPI Banyutowo sesuai dengan prioritasnya, maka dalam lingkup sempit penghasilan dan tingkat kesejahteraan nelayan dan bakul ikan akan meningkat. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati akan meningkat pula.

5.2. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini setelah didasarkan atas matrik QSPM adalah :

1. Rangkaian kegiatan di PPI Banyutowo telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan persyaratan pelelangan ikan yang disyaratkan. Namun demikian PPI Banyutowo masih perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pengguna jasa guna mewujudkan kenyamanan pelayanan yang memadai supaya dapat bersaing dengan tempat pelelangan ikan yang ada di sekitarnya.
2. Langkah-langkah strategi yang harus ditempuh oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan PPI Banyutowo dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. Melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana yang ada di PPI Banyutowo.
 - b. Penegakan Hukum.
 - c. Meningkatkan kebersihan PPI Banyutowo dan mutu ikan hasil tangkap.
 - d. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi hasil tangkap.
 - e. Menjalinkan kerjasama yang baik antara Nelayan, Bakul dan Aparat.
 - f. Membuat kesepakatan bersama dalam penangkapan ikan.
 - g. Meningkatkan kualitas pelayanan.
 - h. Peningkatan pembinaan kepada *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2000. *Laporan Tahunan Tahun 2000*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- _____, 2001. *Laporan Tahunan Tahun 2001*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- _____, 2002 a. *Laporan Tahunan Tahun 2002*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- _____, 2002 b. *Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2001 - 2006*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1981. *Standarisasi dan Pokok - Pokok Disain Pelabuhan Perikanan*. Departemen Pertanian. Jakarta
- _____. 1994. *Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Pelabuhan Perikanan*. Departemen Pertanian. Jakarta
- _____. 1995. *Promosi Peluang Usaha Di Bidang Perikanan*. Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta
- _____. 1996 / 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Manajemen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)*. Direktorat Bina Prasarana. Jakarta.
- Elfandi, SK, 1994. *Administrasi Pelabuhan Perikanan*. Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta
- Husein Umar. 2003. *Strategic Management in Action*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2003 tentang: "Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 Tentang Tempat Pelelangan Ikan."
- Kotler dan Bloom. 1987. *Teknik dan Strategi Memasarkan Jasa Profesional* (diterjemahkan oleh Wilhelmus dan Bakoeutun, SE). Intermedia. Jakarta.
- Makridakis, S. Wheelwright, S dan McGee, V. 1999. *Forecasting, 2nd Edition*. Metode dan Aplikasi Peramalan. Erlangga. Jakarta.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 662 hal.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan”.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Tempat Pelelangan Ikan”.

Rachbini, D.J. 1996. *Ekonomi Politik. Paradigma, Teori, Dan Perspektif Baru*. Centre for Information and Development Studies (CIDES). Jakarta.

Sidik, M. 2000. Kebijakan Fiskal Nasional Untuk Mendukung Otonomi Daerah, *Seminar Otonomi Daerah Dalam Rangka Lustrum I*, Program MEP-UGM, Yogyakarta.

SK Menhub No KM 35/AL.106/PHB-85 , UU No 21/1992 tentang pelayaran, PP 70/1996 tentang Kepelabuhanan.

Tambunan, 1994. *Petunjuk Pengelolaan Pelabuhan Perikanan*. Direktorat Bina Prasarana. Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang “Perikanan”

LAMPIRAN